

**ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI
KEUANGAN SYARIAH PADA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM DESA
(Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa
Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

DESI LATIFAH

NIM. 1817202010

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Latifah
NIM : 1817202010
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

PROF. KH. SAIFUDIN



Desi Latifah

NIM. 18127202010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM DESA (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh Saudara Desi Latifah NIM. 1817202010 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 26 Juli 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Tajal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, terhadap penulisan skripsi dari saudara Desi Latifah NIM. 1817202010 yang berjudul :

Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.

NIP. 19781231 200801 2 027

**ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI
KEUANGAN SYARIAH PADA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM DESA
(Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa
Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)**

Desi Latifah

NIM. 1817202010

E-mail : latifahdesi10@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri merupakan salah satu bentuk program desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan wanita di Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pada kelompok ini terdapat beberapa permasalahan seperti kesalahan dalam penulisan nominal laporan keuangan dalam frekuensi yang cukup sering dan masih kurangnya modal untuk pengelolaan hasil panen. Di mana kedua permasalahan tersebut dikaitkan dengan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Instrumen utama pada penelitian ini dalam bentuk kuesioner yang dibagikan pada 23 responden. Data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil perhitungan indeks masing-masing variabel kemudian dikategorikan yang menyesuaikan tabel kriteria *analysis descriptive presentase*.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri termasuk dalam kategori sedang (61,35%) dan inklusi keuangan syariah termasuk dalam kategori rendah (29,92%). Permasalahan yang ditimbulkan terkait dengan tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada KWT dapat mengancam keberlangsungan program Desa Gunungkarang.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Pemberdayaan Wanita, Kelompok Wanita Tani

**ANALYSIS OF SHARIA FINANCIAL LITERACY AND SHARIA
FINANCIAL INCLUSION IN THE SUSTAINABILITY OF VILLAGE
PROGRAMS**

**(Case Study on Puspa Mandiri Women's Farmer Group in Gunungkarang
Village, Bobotsari District, Purbalingga Regency)**

Desi Latifah

NIM. 1817202010

E-mail : latifahdesi10@gmail.com

Study Program of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business,
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Puspa Mandiri Women's Farmer Group is a form of the Gunungkarang village program that aims to increase women's empowerment in Gunungkarang Village, Bobotsari Districts, Purbalingga Regency. In this group there are several problems such as errors in writing nominal financial statements in a fairly frequent frequency and the lack of capital for harvest management. Where the two problems are associated with the level of financial literacy and sharia financial inclusion. Therefore, this study aims to analyze the level of sharia financial literacy and sharia financial inclusion in the Puspa Mandiri Women's Farmer Group.

This research is included in the field research using a quantitative descriptive approach. The variables in this study are sharia financial literacy and sharia financial inclusion. The main instrument in this study was in the form of a questionnaire which was distributed to 23 respondents. The research data were analyzed using descriptive statistics. The results of the index calculation for each variable are then categorized according to the percentage descriptive analysis criteria table.

The results showed that the level of sharia financial literacy in the Puspa Mandiri Women's Farmer Group in the medium category (61.35%) and sharia financial inclusion was in the low category (29.92%). The problems that arise related to the level of sharia financial literacy and sharia financial inclusion in KWT can threaten the sustainability of Gunungkarang Village programs.

Keywords : *Sharia Financial Literacy, Sharia Financial Inclusion, Women's Empowerment, Women's Farmer Group*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ś	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: نَسْتُ: *nas*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةَ : *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...ا	<i>Fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
إِ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
أُ...و	<i>Ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ : *Iṣlāḥ* حُدُودٌ : *ḥudūd*

مَجَازِي : *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh : نِعْمَةٌ اللّٰهِ : *ni 'matullāh*

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>Jarīmah</i>

D. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: كِتَابُ اللَّهِ : *kitābullah* مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyyah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الْجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-bagyi*

الأحوال الشخصية : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aūfū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan semua ajarannya dan kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya petunjuk, arahan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi., M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, waktu, dan pikiran yang mana sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala kebaikan yang telah diperbuat.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah A 2018.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Achmad Sahidi dan Ibu Sutimah yang telah ikhlas dalam merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa-doa yang tidak pernah terputus hingga saat ini. Doa selalu dipanjatkan agar Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diperbuat.
11. Kakak tercinta Sasi Nurjanah, S.Pd., yang telah mendukung dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diperbuat.
12. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diperbuat.
13. Teman terbaik Adil Nisa, Naila, Hasna, Fera, dan Yulia yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diperbuat.
14. Anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang bersedia membantu kelancaran penelitian. Terimakasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diperbuat.
15. Serta semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat diungkapkan guna menyampaikan terimakasih selain doa semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas jasa kebaikan semuanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekuarangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

Purwokerto, 10 Juni 2022



Desi Latifah
NIM. 18127202010



DAFTAR TABEL

Tabel 2	: Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	: Variabel dan Indikator Penelitian	51
Tabel 3.2	: Kriteria <i>Analysis Deskriptive Presentase</i>	58
Tabel 4.1	: Pemanfaatan Lahan	60
Tabel 4.2	: Profil Anggota Aktif KWT Puspa Mandiri.....	61
Tabel 4.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.4	: Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
Tabel 4.5	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.6	: Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	67
Tabel 4.7	: Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran	68
Tabel 4.8	: Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Syariah	69
Tabel 4.9	: Uji Validitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah	70
Tabel 4.10	: Uji Reliabilitas Variabel Literasi Keuangan Syariah	71
Tabel 4.11	: Uji Reliabilitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah	71
Tabel 4.12	: Kriteria <i>Analysis Deskriptive Presentase</i>	72
Tabel 4.13	: Analisis Statistik Deskriptif Literasi Keuangan Syariah	73
Tabel 4.14	: Persentase Dimensi Literasi Keuangan Syariah	73
Tabel 4.15	: Persentase Responden Berdasarkan Kategori Literasi Keuangan Syariah	74
Tabel 4.16	: Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Usia	75
Tabel 4.17	: Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	75
Tabel 4.18	: Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Pekerjaan.....	76
Tabel 4.19	: Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran.....	76
Tabel 4.20	: Analisis Statistik Deskriptif Inklusi Keuangan Syariah	77
Tabel 4.21	: Persentase Dimensi Inklusi Keuangan Syariah.....	77
Tabel 4.22	: Persentase Responden Berdasarkan Kategori Inklusi Keuangan Syariah	78

Tabel 4.23 : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Usia	79
Tabel 4.24 : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
Tabel 4.25 : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Pekerjaan.....	80
Tabel 4.26 : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran.....	80
Tabel 4.27 : Latar Belakang Tidak Membuka Rekening di LKS	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran 47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian.....	100
Lampiran 2	: Jawaban Responden.....	107
Lampiran 3	: Output SPSS	109
1.	Uji Validitas	109
2.	Uji Reliabilitas	114
3.	Uji Statistik Deskriptif	116
Lampiran 4	: Surat Bimbingan Skripsi.....	117
Lampiran 5	: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	118
Lampiran 6	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	119
Daftar Riwayat Hidup	120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	27
1. Literasi Keuangan Syariah	27
2. Inklusi Keuangan Syariah	37
3. Kelompok Wanita Tani	40
C. Landasan Teologis	45
D. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	48
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	49

D. Variabel Dan Indikator Penelitian	50
E. Pengumpulan Data Penelitian	55
F. Analisis Data Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum	60
1. Potret Wilayah Penelitian	60
2. Sejarah dan Profil Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri	61
3. Visi dan Misi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri	62
4. Tujuan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri	63
5. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri	63
6. Kegiatan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri	64
B. Deskripsi Data	65
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	66
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	67
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran	67
C. Hasil Uji Kualitas Data	68
1. Uji Validitas	68
2. Uji Reliabilitas	71
D. Hasil Analisis Data	72
1. Indeks Literasi Keuangan Syariah	73
2. Indeks Inklusi Keuangan Syariah	77
E. Pembahasan Hasil Penelitian	81
1. Literasi Keuangan Syariah	81
2. Inklusi Keuangan Syariah	85
3. Kaitan Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga) .	89

BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemakmuran suatu negara bergantung pada kesejahteraan penduduknya. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kondisi perekonomian suatu negara. Setiap negara pastinya menginginkan perekonomian yang baik, sehat, dan stabil. Banyak upaya yang dilakukan guna meningkatkan berbagai sektor penunjang perekonomian. Diperlukannya kerjasama antar berbagai pihak. Dalam hal ini, penduduk dapat turut berperan seperti mengelola keuangannya dengan baik sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, untuk menunjang upaya peningkatan perekonomian rakyat berbagai negara melakukan program peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Program yang dilaksanakan secara terukur, terarah, dan tepat sasaran diharapkan mampu membuat penduduk atau dalam hal ini masyarakat menjadi *well literate* sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan produk dan atau jasa keuangan sesuai kebutuhan. Masyarakat yang *well literate* dapat mudah memahami dasar pengelolaan keuangan dengan baik dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sektor usaha jasa keuangan.

Dari total 34 provinsi di Indonesia, terdapat 21 provinsi yang indeks literasinya masih di bawah indeks literasi keuangan nasional. Selain itu, juga masih terdapat gap antara indeks literasi keuangan konvensional dan indeks literasi keuangan syariah. Indeks literasi pada wilayah pedesaan dan perkotaan juga terdapat kesenjangan di antaranya. Terdapat pula gap diantara wanita dan laki-laki. Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan pada tahun 2019 untuk laki-laki sebesar 39,94% sedangkan untuk wanita sebesar 36,13%. Dari sisi inklusi keuangan juga ditemukan selisih antara wanita dan laki-laki. Di mana, pada tahun 2019 indeks inklusi

keuangan laki-laki sebesar 77,2% dan wanita sebesar 75,2% (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Umumnya, lelaki lebih paham akan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dibandingkan dengan wanita.

Padahal masa kini, wanita tidak hanya berpangku tangan menerima hasil pekerjaan suami dan hanya fokus mengurus rumah tangga saja, namun juga dapat ikut serta dalam menambah pendapatan keluarga. Pemberdayaan wanita diusung sebagai bukti akan kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas hidup wanita dalam hal ekonomi, edukasi, perolehan informasi, komunikasi, dan sebagainya (Sukarno & Supriadi, 2013). Salah satu program desa dalam mewujudkan pemberdayaan wanita adalah pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT). Program tersebut dinilai dapat membantu wanita menjadi lebih mandiri dan produktif, serta ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya, petani juga mulai membentuk kelompok dengan tujuan agar orang-orang yang profesinya atau menekuni pekerjaan pada sektor pertanian dapat lebih terorganisir. Pembentukan kelompok tani dapat dijadikan sebagai sarana bertukar pengetahuan guna mengembangkan usaha pertanian secara bersama-sama. Program tersebut mendapat dukungan dari pemerintah sebagai upaya peningkatan dalam bidang pertanian.

Terbentuknya Kelompok Wanita Tani diharapkan dapat memajukan sektor pertanian dengan keterlibatan wanita. Kelompok Wanita Tani sendiri merupakan wadah perkumpulan wanita yang bekerja sebagai petani, isteri seorang petani, maupun wanita yang melakukan kegiatan di bidang pertanian. Selain itu, kelompok wanita tani juga dapat melakukan kegiatan seperti mengembangkan dan menciptakan produk-produk hasil pertanian sebagai upaya peningkatan daya jual hasil panen. Kelompok tersebut dibentuk atas dasar keserasian, keselarasan, serta kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber daya pertanian guna meningkatkan potensi, kreativitas, produktivitas, dan kesejahteraan anggotanya.

Bobotsari dikenal sebagai kota dagang yang menjadi lalu lintas perdagangan, tidak terkecuali produk pertanian. Satu-satunya Kelompok Wanita Tani yang dinilai aktif dan memiliki progress yang cukup baik saat ini adalah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri. Kelompok ini berlokasi di Dusun 2 RT 03 RW 04 Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Beranggotakan 23 orang, kelompok tersebut dibentuk oleh desa sebagai salah satu program pemberdayaan wanita dengan tujuan menjadi wadah berkumpul, bersilaturahmi, bertani bersama, menambah pengetahuan akan pertanian, dan diharapkan mampu membantu perekonomian keluarga. Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri melakukan berbagai kegiatan, antara lain : (1) pertemuan rutin dengan agenda membahas perkembangan pertanian yang digarap, pemberian informasi seputar pertanian, dan evaluasi hasil tanam, (2) bertani tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, dan ada beberapa tanaman hias) dan palawija (ubi, dan jagung), serta (3) pengelolaan hasil panen termasuk membuatnya menjadi produk yang memiliki harga jual lebih tinggi.

Namun, dalam kelompok tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Pada bagian keuangan, dikelola oleh seseorang yang dipercaya amanah akan tetapi masih terdapat kesalahan dalam penulisan nominal di laporan keuangan dalam frekuensi yang cukup sering. Walaupun, uang yang disimpan aman, tetapi kesalahan dalam laporan keuangan merupakan salah satu masalah yang cukup rumit dan dapat menghambat efisiensi karena perlu melakukan pengecekan ulang yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Permasalahan tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan tingkat literasi keuangan yang masih cukup rendah.

Literasi keuangan sendiri berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia merupakan serangkaian proses maupun aktivitas guna meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*convidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen serta masyarakat sehingga diharapkan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik (Direktorat Penelitian Kebijakan

dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2019). Pihak lain mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan tentang konsep ekonomi dan keuangan dasar dengan didukung kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keuangannya guna mengelola sumberdaya keuangan secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan finansial (Saputra & Dewi, 2017). Peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan keuangan dan perubahan sikap maupun perilaku dalam pengelolaan keuangan yang nantinya digunakan dalam menentukan lembaga keuangan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya itulah tujuan dari literasi keuangan. Atau dengan kata lain, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pemahaman dan kemampuan dalam mengelola dana yang dimiliki agar dapat berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan diperlukan agar terhindar dari masalah keuangan karena seringkali seseorang dihadapkan pada situasi yang mengharuskan pengelolaan keuangan yang benar dan diharapkan bisa memanfaatkan uang yang dimiliki semaksimal mungkin. Selain itu, literasi keuangan juga dibutuhkan untuk dapat meminimalisasi kesalahan dalam pengelolaan keuangan termasuk penyusunan laporan keuangan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang tinggi berpotensi mewujudkan kesejahteraan karena memiliki nilai produktivitas dan daya saing yang tinggi.

Selain permasalahan pada pengelolaan keuangan khususnya pada penyusunan laporan keuangan, Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri juga masih memiliki kendala keuangan dalam modal mengembangkan produk tanaman pangan. Perlu adanya benih maupun alat-alat penunjang aktivitas pertanian. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan inklusi keuangan yang baik. Adapun yang dimaksud sebagai inklusi keuangan menurut Strategi Keuangan dan Inklusif Bank Indonesia, merupakan hak bagi setiap manusia untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh terhadap harkat dan martabatnya. Atau dengan kata

lain, inklusi keuangan adalah sebuah proses ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga bagi seluruh pelaku ekonomi. Layanan keuangan disediakan bagi seluruh aspek masyarakat dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk daerah terpencil. Kebijakan inklusi keuangan pada sektor perekonomian diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup baik masyarakat daerah maupun yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Kemudahan akses masyarakat dengan tersedianya produk dan layanan lembaga keuangan yang semakin ditingkatkan kualitasnya merupakan tujuan dari adanya inklusi keuangan. Lembaga keuangan yang dituju adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Seperti yang sudah peneliti pelajari bahwa produk dari Lembaga Keuangan Syariah perihal keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh dikemudian hari akan lebih terkesan adil dibandingkan dengan produk bank konvensional atau bahkan rentenir yang realitanya memberatkan salah satu pihak.

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah diharapkan membantu masyarakat dalam menangani masalah berkaitan dengan bunga ataupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah sendiri merupakan lembaga yang dalam praktiknya tidak lepas dari sistem ekonomi syariah. Adapun jenis dari Lembaga Keuangan Syariah diantaranya ada Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, dan Baitul Maal Wat Tamwil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia dan keseimbangan (*'adlwatawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Penghimpunan dana sebagai salah satu aktivitas perbankan dalam lembaga keuangan syariah jelas menggunakan prinsip syariah, sehingga nasabah diharapkan merasa aman

dan nyaman. Mayoritas produk penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Sedangkan pada pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Aisyah, 2014). Secara garis besar, produk pembiayaan syariah dikategorikan menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap lainnya.

Literasi dan inklusi keuangan syariah mempunyai korelasi yang erat antara satu sama lain (Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2016). Literasi keuangan sebagai salah satu faktor guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan sektor jasa keuangan yang diawali dengan pengetahuan dan pemahaman, keyakinan akan jasa keuangan, kemudian secara aktif terlibat atau menggunakan jasa keuangan. Atau dengan kata lain, peningkatan pemahaman dan kemampuan keuangan dapat meningkatkan penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan lembaga keuangan. Adapun yang dinamakan sebagai tiga pilar utama dalam strategi nasional literasi keuangan yaitu, (1) mengedepankan program-program mengenai edukasi serta sosialisasi literasi keuangan, (2) penguatan akan infrastruktur literasi keuangan, dan (3) pengembangan produk dan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh semua pihak (Yuwono, Suharjo, Sanim, & Nurmalina, 2017). Tujuan dari literasi keuangan sendiri adalah meningkatkan literasi dari *not literate* menjadi *well literate* sehingga secara tidak langsung akses atau inklusi pada lembaga keuangan dapat meningkat.

Kuangan perlu dikelola dengan baik, karena kunci dari keberhasilan seseorang salah satunya adalah mampu mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Terutama untuk kaum wanita yang seringkali diberikan amanat untuk mengelola keuangan dalam suatu kelompok atau

umumnya keluarga. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat *Al-Furqon* ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Artinya : Dan, orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hamba Allah memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah di mana apabila kebutuhannya telah tercukupi, maka mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Nafkah dalam hal ini adalah sunnah bukanlah wajib. Adapun berlebihan dalam nafkah wajib tidak dilarang atau tercela akan tetapi walaupun sedikit harta yang dikeluarkan bersifat haram itulah yang tercela (Shihab, 2002). Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip Islam. Harta yang diperoleh dan dikeluarkan harus jelas dan tidak melanggar aturan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)”**. Tujuan dari penelitian ini garis besarnya adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada kelompok wanita tani tersebut, karena seperti yang diketahui bahwa pengelolaan keuangan dalam kelompok ini masih terdapat masalah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kelompok wanita tani akan pentingnya literasi keuangan dan merubah mindset mereka agar menggunakan akses lembaga keuangan berbasis syariah. Kombinasi antara tingkat literasi keuangan yang tinggi dan terbukanya akses atau inklusi keuangan syariah, diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program desa melalui Kelompok Wanita Tani Puspa

Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana akses atau tingkat inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana kaitannya tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada keberlangsungan program desa (Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dengan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dengan menganalisis akses atau inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk mengetahui dengan menganalisis kaitannya tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada keberlangsungan program desa (Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga).

Sedangkan kegunaan yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini di antaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah khususnya pada studi kasus Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini juga menjadi tolak ukur kemampuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berupa wawasan, pemahaman, serta masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, pembaca, maupun pihak lainnya mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Khususnya bagi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta menggunakan akses lembaga keuangan syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, secara garis besar terdiri atas lima Bab dengan beberapa Sub Bab yang terkait satu sama lain guna mempermudah pembahasan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya meliputi :

Bab I Pendahuluan, merupakan penjabaran singkat pemasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Terdiri atas latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat kajian pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum terkait dengan judul penelitian, landasan teologis, serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan terkait jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjabarkan tentang hasil penelitian dan analisis yang berisi gambaran umum mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada keberlangsungan program desa pemberdayaan wanita khususnya Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Bab V Penutup, mencakup kesimpulan dari pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran berkaitan dengan penelitian guna pengembangan ke depannya.

Pada bagian terakhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang memuat beberapa referensi penelitian serta melampirkan data-data terkait dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait dengan tingkat literasi keuangan syariah maupun inklusi keuangan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan pada variabel-variabel atau fokus penelitian tertentu, metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, serta tempat dan waktu penelitian antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Adapun penjabaran dari beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe pada tahun 1998 yang berjudul “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”. Hasil penelitian tersebut setelah diolah dengan metode penelitian kuantitatif lewat regresi logistik dengan variabel yang memuat X_1 (Disiplin Akademik), X_2 (Peringkat Kelas), X_3 (Jenis Kelamin), X_4 (Ras), X_5 (Kebangsaan), X_6 (Pengalaman Kerja), X_7 (Usia), X_8 (Pendapatan), Y (Literasi Keuangan) pada 924 mahasiswa menunjukkan bahwa responden menjawab 53% pertanyaan dengan benar. Pada jurusan non bisnis, wanita, siswa dengan peringkat kelas bawah, di bawah usia 30 tahun, dan dengan sedikit pengalaman kerja memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Mahasiswa yang kurang berpengetahuan cenderung membuat keputusan yang salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa belum memiliki pengetahuan tentang personal keuangan (Chen & Volpe, 1998). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Chen dan Volpe dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel yang digunakan. Di mana penelitian terdahulu memiliki variabel independen yang kompleks serta secara umum bukan dalam lingkup syariah dan tidak mengulas inklusi keuangan syariah. Data juga diolah dengan menggunakan metode regresi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, sampel yang digunakan oleh

penelitian terdahulu adalah mahasiswa yang jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rika Desiyanti pada tahun 2016 yang berjudul “Literasi dan Inklusi Keuangan serta Indeks Utilitas UMKM di Padang”. Hasil penelitian tersebut setelah diolah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa UMKM di Padang bisa dikatakan masih memerlukan edukasi akan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan pada beberapa UMKM dan minat akan penggunaan produk dan lembaga keuangan masih perlu mendapat perhatian. Adapun produk keuangan yang paling tinggi nilai indeks utilitasnya adalah produk keuangan perbankan dengan tabungan sebagai primadonanya dan yang paling rendah adalah produk keuangan pasar modal (Desiyanti, 2016). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Subjek dari penelitian terdahulu adalah UMKM khususnya yang ada di Padang, sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah Kelompok Wanita Tani khususnya KWT Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain, objek penelitian yang akan dilakukan yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rika Desiyanti meliputi literasi keuangan, inklusi keuangan, dan indeks utilitas. Pada bagian metode penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian terdahulu memilih pendekatan kualitatif deskriptif.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Minto Yuwono, Budi Suharjo, Bunasor Sanim, dan Rita Nurmalina pada tahun 2017 dengan mengangkat judul berupa “Analisis Deskriptif atas Literasi Keuangan Pada Kelompok Tani”. Penelitian yang menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) menunjukkan bahwa dari tiga provinsi yang meliputi

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam mengelola keuangan baru sebagian kecil petani yang menggunakan lembaga keuangan baik untuk penyimpanan dana maupun pinjaman. Tidak lebih dari 6% petani yang merencanakan pengelolaan keuangan. Apabila ada kebutuhan mendadak, mereka lebih memilih pinjaman keluarga atau teman (Yuwono, Suharjo, Sanim, & Nurmalina, 2017). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Minto Yuwono, dkk memilih subjek kelompok tani yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Objek pada penelitian terdahulu terbatas pada literasi keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan selain literasi keuangan juga meneliti dari segi inklusi keuangan syariah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Susilawati dan Siti Puryandani di tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Struktur Modal UMKM dengan Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Pada UMKM Klaster Mebel dan Furniture Kota Semarang)” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda serta uji path dan sobel. Hasilnya, Inklusi keuangan dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keputusan struktur modal pada UMKM di Kota Semarang. Akan tetapi, inklusi tersebut berpengaruh negatif pada keputusan struktur modal dan berbanding terbalik dengan literasi keuangan yang berpengaruh positif pada keputusan struktur modal (Susilawati & Puryandani, 2020). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian. Objek pada penelitian oleh Eka Susilawati dan Siti Puryandani adalah UMKM terutama klaster mebel dan furniture di Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menetapkan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sebagai objek penelitiannya.

Selanjutnya, Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dan mengangkat judul "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo". Penelitian dengan memakai *ex-post facto* pada pendekatan kuantitatif yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda menyimpulkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kinerja UMKM di Sidoarjo (Septiani & Wuryani, 2020). Perbedaan antara penelitian oleh Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. Adapun subjek pada penelitian oleh Risa dan Eni adalah UMKM di Sidoarjo, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memilih Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sebagai subjek penelitian.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Robby Tito Dermawan, Nunuk Triwahyuningtyas, dan Agus Kusmana pada tahun 2020 yang mengangkat judul "Implementasi Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia" dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif pada variabel inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan perbankan syariah di Indonesia termasuk dalam kategori inklusi keuangan yang rendah. Adapun dimensi yang masuk dalam pengukuran indeks meliputi aksesibilitas, availabilitas, dan kegunaan. Dimensi yang paling berpengaruh dalam pengukuran ini adalah dimensi kegunaan yang diikuti availabilitas dan terakhir aksesibilitas (Dermawan, Triwahyuningtyas, & Kusmana, 2020). Perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perbankan syariah yang ada di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian terdahulu tidak mengulas tentang tingkat literasi keuangan syariah.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Kurniati Yunus dan Rini pada tahun 2021 dengan judul “Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian dengan model regresi sederhana menunjukkan indeks literasi keuangan dalam kategori sedang dan inklusi keuangan termasuk rendah. Literasi keuangan juga memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan (Yunus & Rini, 2021). Perbedaan terletak pada model penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan regresi sederhana sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, sampel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan yang berdomisili di kota Makassar, Parepare, dan Sindenreng Rappang sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Wachidah Fauziyanti dan Fidyah Yuli Ernawati pada tahun 2021 yang berjudul “Analisa Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kinerja Usaha UKM Petani Bunga Kopeng” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada data sekunder dari hasil riset dan referensi kepustakaan. Hasil penelitian pada anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Desa Kopeng menunjukkan bahwa rata-rata literasi dan inklusi keuangan termasuk dalam *sufficient literate* dengan skala 3,78 yang dapat diartikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan akan lembaga keuangan termasuk fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya. Mereka juga telah memiliki akses pembiayaan pada lembaga keuangan yang digunakan untuk meningkatkan usahanya (Fauziyanti & Ernawati, 2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian dan metode penelitian. Di mana, penelitian terdahulu menetapkan UKM Petani Bunga Kopeng sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memilih

Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pada bagian metode penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian terdahulu memilih pendekatan kualitatif deskriptif.

Dari penjabaran di atas, guna mempermudah pembaca dalam memahami beberapa penelitian tersebut, maka peneliti rangkum data di atas menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe (1998) An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students	Metode penelitian kuantitatif dengan model regresi logistik. Adapun Variabelnya meliputi : Independen 1 (X ₁) : Disiplin Akademik Independen 2 (X ₂) : Peringkat Kelas	Survei yang dilakukan pada 924 mahasiswa menunjukkan bahwa responden menjawab 53% pertanyaan dengan benar. Pada jurusan non bisnis, wanita, siswa dengan peringkat kelas bawah, di bawah usia 30 tahun, dan dengan sedikit pengalaman kerja memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel yang digunakan. Di mana penelitian terdahulu memiliki variabel independen yang kompleks serta secara umum bukan dalam lingkup

		<p>Independen 3 (X₃) : Jenis Kelamin</p> <p>Independen 4 (X₄) : Ras</p> <p>Independen 5 (X₅) : Kebangsaan</p> <p>Independen 6 (X₆) : Pengalaman Kerja</p> <p>Independen 7 (X₇) : Usia</p> <p>Independen 8 (X₈) : Pendapatan</p> <p>Dependen (Y) : Literasi Keuangan</p>	<p>Mahasiswa yang kurang berpengetahuan cenderung membuat keputusan yang salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa belum memiliki pengetahuan tentang personal keuangan.</p>	<p>syariah dan tidak mengulas inklusi keuangan syariah. Data juga diolah dengan menggunakan metode regresi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah mahasiswa yang jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri</p>
--	--	---	--	--

				Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.
2.	Rika Desiyanti (2016) Literasi dan Inklusi Keuangan serta Indeks Utilitas UMKM di Padang	Metode penelitian kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan adalah literasi dan inklusi keuangan.	UMKM di Padang bisa dikatakan masih memerlukan edukasi akan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan pada beberapa UMKM dan minat akan penggunaan produk dan lembaga keuangan masih perlu mendapat perhatian. Adapun produk keuangan yang paling tinggi nilai indeks utilitasnya adalah produk keuangan perbankan dengan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek dan objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Subjek dari penelitian terdahulu adalah UMKM khususnya yang ada di Padang, sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah KWT Puspa Mandiri Desa

			<p>tabungan sebagai primadonanya dan yang paling rendah adalah produk keuangan pasar modal.</p>	<p>Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain, objek penelitian yang akan dilakukan yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rika Desiyanti meliputi literasi keuangan, inklusi keuangan, dan indeks utilitas. Pada bagian metode penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan pada</p>
--	--	--	---	---

				penelitian terdahulu memilih pendekatan kualitatif deskriptif.
3.	Minto Yuwono, Budi Suharjo, Bunasor Sanim, dan Rita Nurmalina (2017) Analisis Deskriptif atas Literasi Keuangan Pada Kelompok Tani	Penelitian dengan menggunakan <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM). Variabel yang digunakan adalah literasi keuangan.	Dari tiga provinsi yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam mengelola keuangan baru sebagian kecil petani menggunakan lembaga keuangan baik untuk penyimpanan dana maupun pinjaman. Tidak lebih dari 6% petani yang merencanakan pengelolaan keuangan. Apabila ada kebutuhan mendadak, mereka lebih	Pada penelitian yang dilakukan oleh Minto Yuwono, dkk memilih subjek kelompok tani yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

			memilih pinjaman keluarga atau teman.	Objek pada penelitian terdahulu terbatas pada literasi keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan selain literasi keuangan juga meneliti dari segi inklusi keuangan syariah.
4.	Eka Susilawati dan Siti Puryandani (2020) Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Struktur Modal UMKM dengan Inklusi	Metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda serta uji path dan sobel. Adapun variabelnya meliputi :	Inklusi keuangan dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keputusan struktur modal pada UMKM di Kota Semarang. Akan tetapi, inklusi tersebut berpengaruh negatif pada keputusan struktur modal dan berbanding	Objek pada penelitian oleh Eka Susilawati dan Siti Puryandani adalah UMKM terutama klaster mebel dan furniture di Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menetapkan Kelompok

	Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Pada UMKM Klaster Mebel dan Furniture Kota Semarang	Independen (X) : Literasi keuangan Moderator (Z) : Inklusi Keuangan Dependen (Y) : Keputusan struktur modal	terbalik dengan literasi keuangan yang berpengaruh positif pada keputusan struktur modal.	Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sebagai objek penelitiannya.
5.	Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani (2020) Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo	Penelitian dengan memakai <i>ex-post facto</i> pada pendekatan kuantitatif yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Adapun variabelnya meliputi : Independen (X ₁) : Literasi Keuangan Independen (X ₂) : Inklusi	Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan erja UMKM di Sidoarjo	Adapun subjek pada penelitian oleh Risa dan Eni adalah UMKM di Sidoarjo, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memilih Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sebagai subjek penelitian.

		Keuangan Syariah Dependen (Y) : Kinerja UMKM di Sidoarjo		
6.	Robby Tito Dermawan, Nunuk Triwahyuni ngtyas, dan Agus Kusmana (2020) Implementasi Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Metode penelitian kuantitatif deskriptif. Variabel yang digunakan adalah inklusi keuangan.	Perbankan syariah di Indonesia termasuk dalam kategori inklusi keuangan yang rendah. Adapun dimensi yang masuk dalam pengukuran indeks meliputi aksesibilitas, availabilitas, dan kegunaan. Dimensi yang paling berpengaruh dalam pengukuran ini adalah dimensi kegunaan yang diikuti availabilitas dan aksesibilitas.	Perbedaan terletak pada sampel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perbankan syariah yang ada di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

				Selain itu, penelitian terdahulu tidak mengulas tentang tingkat literasi keuangan syariah.
7.	Kurniati Yunus dan Rini (2021) Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan	Metode penelitian kuantitatif dengan model regresi sederhana. Variabel yang digunakan adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan.	Penelitian yang dilakukan pada perbankan syariah di provinsi Sulawesi menunjukkan indeks literasi keuangan dalam kategori sedang dan inklusi keuangan termasuk rendah. Literasi keuangan juga memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan.	Perbedaan terletak pada model penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan regresi sederhana sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, sampel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan masyarakat provinsi

				<p>Sulawesi Selatan yang berdomisili di kota Makassar, Parepare, dan Sindenreng Rappang sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.</p>
8.	<p>Wachidah Fauziyanti dan Fidyah Yuli Ernawati (2021) Analisa Literasi Keuangan, Inklusi</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada data sekunder dari hasil riset dan referensi kepustakaan.</p>	<p>Hasil penelitian pada anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Desa Kopeng menunjukkan bahwa rata-rata literasi dan inklusi keuangan termasuk dalam</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian dan metode</p>

	<p>Keuangan dan Kinerja Usaha UKM Petani Bunga Kopeng</p>		<p><i>suuficient literate</i> dengan skala 3,78 yang dapat diartikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan akan lembaga keuangan termasuk fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya. Mereka juga telah memiliki akses pembiayaan pada lembaga keuangan yang digunakan untuk meningkatkan usahanya</p>	<p>penelitian. Di mana, penelitian terdahulu menetapkan UKM Petani Bunga Kopeng sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memilih Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pada bagian metode penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan pada</p>
--	---	--	--	---

				penelitian terdahulu memilih pendekatan kualitatif deskriptif.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Literasi Keuangan Syariah

a. Definisi Literasi Keuangan Syariah

Programme For International Student Assessment (PISA) yang merupakan sebuah program rancangan dari *Organization For Economic co-Operation and Development* membagikan definisi dari literasi keuangan yaitu berupa pengetahuan dan pemahaman akan konsep-konsep keuangan dan risikonya, serta keterampilan, motivasi, dan kepercayaan yang digunakan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam bidang keuangan atau dapat dikatakan melek keuangan bagi semua pihak yang nantinya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (*Programme For International Student Assesment*, 2012). Adapun literasi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia merupakan serangkaian proses maupun aktivitas guna meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*convidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen serta masyarakat sehingga diharapkan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik (*Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, 2019).

Menurut Remund, terdapat lima kategori mengenai definisi konseptual dari literasi keuangan. Adapun rincian dari kategori tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan mengenai konsep dari keuangan

- 2) Kemampuan dalam berkomunikasi tentang konsep keuangan
- 3) Ketangkasan pribadi dalam mengelola keuangan
- 4) Kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang kiranya tepat, dan
- 5) Kemampuan untuk merencanakan masa depan keuangan yang efektif dan efisien atau sesuai dengan kebutuhannya.

Dari kelima kategori tersebut, munculah definisi literasi keuangan secara umum yaitu sebuah langkah pada suatu tingkatan yang mampu memahami konsep dari keuangan, proses untuk mengembangkan kemampuan dalam mengurus keuangan pribadinya secara tepat atau efektif dan efisien dalam jangka waktu baik itu pendek, menengah, maupun panjang guna merubah keadaan perekonomiannya (David, 2010).

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam (Yunus & Rini, 2021). Literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai penguasaan individu atas pengetahuan, pemahaman, beserta kemampuan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan yang baik juga memerlukan adanya edukasi keuangan yang tepat. Edukasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep dasar keuangan syariah. Dasar dari edukasi keuangan syariah meliputi perbedaan dasar antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah serta akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah. Dalam konteks pembangunan, literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa masyarakat tidak hanya sekadar mengetahui dan memahami mengenai lembaga keuangan syariah akan tetapi juga dapat mengubah serta memperbaiki perilakunya dalam pengelolaan

keuangan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan.

b. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025

Otoritas Jasa Keuangan rutin dalam menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diperlukan sebagai informasi dan pedoman dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Terdapat banyak komponen penting berupa informasi mengenai hasil riset OJK mengenai literasi keuangan di Indonesia serta solusi atau strategi yang disusun untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Visi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2021-2025 sendiri yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki Indeks Literasi Keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan”. Adapun misi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025 meliputi :

- 1) Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan
- 2) Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan
- 3) Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

c. Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dicantumkan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia menjelaskan bahwa literasi keuangan terbagi atas beberapa tingkatan. Adapun rincian dari tingkatan literasi keuangan yaitu :

- 1) *Well Literate*

Diartikan bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga keuangan beserta produk dan atau jasa yang ditawarkannya. Fasilitas, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban juga dipahami oleh masyarakat sehingga mereka dapat dikatakan telah terampil dalam menggunakan produk dan atau jasa keuangan tersebut.

2) *Sufficient Literate*

Hampir sama dengan *well literate* di mana masyarakat mampu memahami dan memiliki keyakinan akan lembaga keuangan termasuk fasilitas, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada tingkatan ini, masyarakat belum terampil dalam menggunakan produk dan atau jasa keuangan.

3) *Less Literate*

Dalam tingkatan ini masyarakat hanya mengetahui tentang lembaga keuangan beserta produk dan atau jasa yang ditawarkannya.

4) *Not Literate*

Merupakan tingkatan di mana masyarakat tidak memiliki pengetahuan serta keyakinan terhadap lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga tidak terampil dalam memanfaatkan produk dan atau jasa keuangan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Sedangkan menurut Chen dan Volpe, tingkat literasi keuangan dikategorikan berdasarkan presentase dari indeks literasi keuangan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1) Kurang dari 60 persen (<60%)

Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan yang rendah di mana masih rendahnya pengetahuan tentang keuangan. Pihak yang masuk dalam kategori ini cenderung membuat keputusan keuangan dan perencanaan keuangan yang salah.

2) Diantara 60 dan 80 persen ($60 \leq 80$)

Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan yang sedang. Pada tingkatan ini, individu sudah memiliki pengetahuan keuangan akan tetapi masih belum terampil dalam mengelola keuangan.

3) Lebih dari 80 persen ($>80\%$)

Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan yang tinggi. Pihak yang termasuk dalam tingkatan ini memiliki pengetahuan keuangan yang baik. Pada tingkat ini, pembuatan keputusan keuangan dan perencanaan keuangan sudah baik serta mampu dipertanggung jawabkan (Chen & Volpe, 1998)

d. Tujuan Literasi Keuangan Syariah

Secara umum, tujuan dari literasi keuangan sendiri adalah meningkatkan literasi dari *not literate* menjadi *well literate* sehingga secara tidak langsung akses atau inklusi pada lembaga keuangan dapat meningkat. Tujuan dari literasi keuangan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan atau masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan
- 2) Dapat mengubah sikap dan perilaku dalam hal pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan produk dan atau jasa lembaga keuangan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Selain hal di atas, terdapat tujuan dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah yang meliputi :

- 1) Meningkatkan literasi keuangan syariah dari *not literate* atau *less literate* menjadi *well literate*

- 2) Meningkatkan kuantitas pemanfaatan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan syariah dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan atas prinsip syariah (halal dan menguntungkan).

e. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Manfaat dari literasi keuangan syariah dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Berikut merupakan rincian dari manfaat literasi keuangan :

1) Masyarakat

Manfaat literasi keuangan bagi masyarakat meliputi :

- a) Meningkatkan pengetahuan keuangan dasar syariah sehingga masyarakat dapat merencanakan pengelolaan keuangan dengan lebih baik
- b) Meningkatkan kemampuan dalam memilih dan memanfaatkan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan
- c) Mengurangi risiko kejahatan terkait transaksi keuangan.

2) Sektor Industri Keuangan

Secara umum, literasi keuangan syariah memberikan manfaat yang terbilang besar bagi sektor industri keuangan syariah. Tidak menutup kemungkinan masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi menjadi pengguna produk dan atau jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Sehingga, keuntungan yang diperoleh industri keuangan syariah juga semakin besar. Literasi keuangan syariah mampu mendorong industri keuangan syariah agar tetap menciptakan dan mengembangkan produk dan atau jasa keuangan yang lebih beragam, inovatif, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Ekonomi Makro

Terdapat manfaat literasi keuangan syariah bagi sektor ekonomi makro yaitu :

- a) Bertambahnya kuantitas masyarakat yang *well literate* dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa keuangan syariah yang secara langsung maupun tidak langsung mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan
- b) Meningkatnya kuantitas pemanfaatan produk tabungan dan investasi syariah yang diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan sehingga ekonomi nasional akan semakin kuat dan mampu bersaing di kancan global
- c) Semakin banyak pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, maka intermediasi di sektor keuangan syariah juga diharapkan semakin meningkat.

Selain hal di atas, terdapat manfaat dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat yang meliputi :

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam memilih dan memanfaatkan produk dan atau jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan keuangan dengan baik dan sesuai prinsip syariah
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat serta risiko dari masing-masing produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.

f. Prinsip Dasar Literasi Keuangan Syariah

Prinsip dasar literasi keuangan diperlukan dalam setiap kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan. Prinsip tersebut secara umum dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Adapun rincian dari prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terencana dan terukur

Segala kegiatan yang nantinya akan dilakukan harus memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan, serta indikator yang tepat agar dapat memperoleh informasi yang digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan.

2) Berorientasi pada pencapaian

Kegiatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada diharapkan dapat mencapai tujuan dalam hal ini meningkatkan literasi keuangan.

3) Berkelanjutan

Demi mencapai tujuan jangka panjang, maka diperlukan kegiatan yang berkesinambungan. Pelaku usaha jasa keuangan diharuskan paham mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan atau layanan dari jasa keuangan.

4) Kolaborasi

Kerjasama seluruh pihak yang berkepentingan jelas diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang secara bersama-sama (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Selain itu, juga terdapat prinsip literasi keuangan syariah yang meliputi :

1) Universal dan inklusif

Program dari literasi keuangan syariah harus dapat mencakup dan terbuka untuk semua golongan masyarakat. Tidak adanya pembatasan bagi setiap agama maupun golongan.

2) Sistematis dan terukur

Penyampaian mengenai program literasi keuangan syariah harus terencana, sistematis, sederhana, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

3) Kemudahan akses

Informasi dan layanan terkait dengan literasi keuangan syariah dapat diakses dengan mudah di seluruh wilayah Indonesia.

4) Kemaslahatan

Program literasi keuangan syariah yang dijalankan harus mampu membawa kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat.

5) Kolaborasi

Keterlibatan seluruh *stakeholders* syariah diperlukan secara bersamaan dalam perencanaan dan implementasi dari program literasi keuangan syariah (Yunus & Rini, 2021).

g. Fungsi Peningkatan Literasi Keuangan

Fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan menurut Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016 yaitu :

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan
- 2) Pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan
- 3) Pemberian masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan pengembangan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen.

h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan seseorang, meliputi :

1) Gender

Jenis kelamin seseorang berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan dapat berpengaruh pada tingkat literasi. Umumnya, lelaki lebih paham akan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dibandingkan dengan wanita.

2) Pendidikan

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahaman akan konsep-konsep dalam keuangan.

3) Pendapatan

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin kompleks dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan yang tinggi seringkali diiringi kebutuhan yang tinggi pula.

i. Dimensi Literasi Keuangan

Terdapat beberapa dimensi dalam literasi keuangan, di antaranya :

1) Dimensi pengetahuan

Dimensi ini didasarkan pada pengetahuan seseorang akan berbagai konsep dasar keuangan yang menjadi komponen penting. Konsep dasar keuangan sendiri meliputi pengetahuan umum tentang keuangan, tingkat bunga, risiko dan tingkat pengembalian, serta inflasi. Pemahaman akan konsep tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan seseorang mengenai pengelolaan keuangan.

2) Dimensi perilaku

Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan perilaku yang baik mengenai pengelolaan keuangan yaitu : (1) melakukan manajemen atau penganggaran keuangan dengan baik, (2) memiliki tabungan, (3) mempertimbangkan dalam pembelian serta pembayaran berbagai tagihan, (4) dilakukannya pengawasan akan urusan keuangan untuk tujuan jangka panjang, dan (5) menghindari atau meminimalisasi pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.

3) Dimensi sikap

Dimensi ini berkaitan dengan preferensi seseorang dalam menghabiskan pendapatan atau uang yang dimilikinya

(Organization For Economic Co-operation and Development, 2013).

2. Inklusi Keuangan Syariah

a. Definisi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan menurut Strategi Keuangan dan Inklusif Bank Indonesia, merupakan hak bagi setiap manusia untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh terhadap harkat dan martabatnya. Atau dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan yaitu akses bagi setiap orang untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan baik melalui transaksi pembayaran, pembiayaan, tabungan, maupun asuransi secara efektif dan berkelanjutan (Fauziyanti & Ernawati, 2021).

Adapun yang dimaksud dengan inklusi keuangan syariah yaitu upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah agar mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Yunus & Rini, 2021). Inklusi keuangan syariah juga dapat diartikan tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

b. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia meliputi :

1) Terukur

Perencanaan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan perlu mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, sistem, waktu, maupun mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan atau layanan jasa keuangan. Atau dengan kata lain kegiatan tersebut harus terukur sehingga akses yang disediakan dapat

dikembangkan dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan peningkatan inklusi keuangan.

2) Terjangkau

Keterjangkauan akses kegiatan peningkatan inklusi keuangan harus dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat dan diusahakan berbiaya rendah ataupun tanpa biaya serta memanfaatkan teknologi yang tepat.

3) Tepat sasaran

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan inklusi kuangan harus tepat atau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen ataupun masyarakat yang menjadi sasaran.

4) Berkelanjutan

Guna mencapai target yang telah direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kemampuan dan kebutuhan masyarakat atau konsumen, maka diperlukan kegiatan peningkatan inklusi keuangan secara berkelanjutan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

c. Tujuan Inklusi Keuangan

Tujuan inklusi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan atau masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatkan akses masyarakat akan lembaga, produk, dan layanan dari jasa keuangan
- 2) Meningkatkan penyediaan produk dan atau jasa lembaga keuangan
- 3) Meningkatkan pemanfaatan produk dan atau jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

d. Manfaat Keuangan Inklusif

Adapun manfaat yang dapat diperoleh masyarakat akan keuangan yang semakin inklusif diantaranya :

- 1) Kemudahan akses pelaku usaha dalam meminjam modal pada lembaga keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi
- 2) Terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan agar masyarakat golongan menengah ke bawah juga dapat mengakses produk dan atau jasa lembaga keuangan dengan lebih mudah
- 3) Meminimalisasi atau bahkan menghilangkan rentenir yang ada di masyarakat karena kemudahan dalam mengakses produk dan atau jasa lembaga keuangan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

e. Dimensi Inklusi Keuangan

Terdapat beberapa dimensi atau indikator inklusi keuangan, yaitu :

1) *Product holding*

Indikator ini memuat beberapa produk dan jasa keuangan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga, yaitu (1) produk tabungan dan dana pensiun, (2) kepemilikan fasilitas pembayaran (tidak termasuk kartu kredit), rekening giro, dan uang elektronik, (3) kepemilikan produk asuransi, dan (4) kepemilikan fasilitas kredit.

2) *Product awareness*

Kesadaran akan keberadaan, fungsi dan manfaat dari produk atau jasa dari lembaga keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam penggunaan layanan lembaga keuangan.

3) *Product choice*

Indikator ini merupakan kelanjutan dari indikator sebelumnya, di mana setelah mengetahui informasi mengenai

produk dan jasa keuangan, maka seseorang akan membuat pilihan mengenai layanan lembaga keuangan yang akan digunakan (Organization For Economic Co-operation and Development, 2013).

4) Ketersediaan akses

Ketersediaan akses dalam hal ini berarti kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan baik secara fisik maupun harga bagi masyarakat.

3. Kelompok Wanita Tani

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan pemberdayaan wanita sebagai upaya guna memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar wanita dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk memiliki kemampuan dalam berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan sehingga diharapkan mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Indeks Pembangunan Gender di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan nilai 91,07 atau masih ada sekitar 9% kesenjangan bagi wanita. Hal tersebut berarti angka harapan hidup, akses untuk pendidikan, dan nilai pendapatan wanita masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Banyak terjadi ketimpangan pada wanita di berbagai sektor. Misalnya pendidikan, di mana data menunjukkan taraf pendidikan wanita di perkotaan maupun pedesaan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Sektor kerja formal nyatanya masih didominasi laki-laki yakni dengan persentase sebesar 64,95%. Kekerasan terhadap wanita juga terus meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi untuk mendukung upaya pemberdayaan wanita. Bagi wanita, upaya

pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tiga indikator. Pertama adalah indikator keluaran (*output indicator*) yang ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah wanita. Indikator hasil (*income indicator*) yang ditandai dengan wanita yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka. Terakhir adalah indikator dampak (*impact indicator*) yang ditandai dengan wanita yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu wanita lainnya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tujuan dari pemberdayaan ini meliputi :

- a. Peningkatan peran dan kedudukan wanita dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat
- b. Peningkatan peran wanita untuk pengambilan keputusan guna mewujudkan kesetaraan
- c. Peningkatan kualitas dan kemandirian kelompok atau organisasi wanita
- d. Peningkatan komitmen semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
- e. Berkembangnya usaha serta program pemberdayaan wanita (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Pemerintah desa turut membuat program untuk meningkatkan pemberdayaan wanita. Visi dari pemberdayaan ini adalah mewujudkan desa berkeadilan gender di mana kepemimpinan wanita dapat memastikan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan desa.

Terdapat indikator utama untuk mencapai visi tersebut yang meliputi :

- a. Kepemilikan data gender di desa, yang mana pada data tersebut memuat beberapa isu gender yang dihasilkan dari analisis gender
- b. Pelaksanaan anggaran responsif gender oleh desa, yang mengakomodasi keadilan bagi wanita dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi aktif dalam pengambilan

keputusan, kontrol sumber daya, serta kesetaraan menikmati hasil dari pembangunan

- c. Pembuatan kebijakan yang mewujudkan kesetaraan gender
- d. Pembentukan organisasi atau kumpulan wanita yang mampu mendorong kepemimpinan wanita di pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya
- e. Adanya layanan hukum guna menegakkan keadilan bagi wanita.

Pemberdayaan wanita di desa memiliki beberapa tingkatan di antaranya :

- a. Kesejahteraan, pada tingkatan ini wanita berkecukupan dalam kebutuhan dasarnya seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, termasuk juga pendapatan yang diperoleh
- b. Akses, di mana wanita memiliki akses sumber daya, fasilitas, maupun layanan hukum
- c. Kesadaran kritis, pada tingkatan ini wanita mampu memahami akar permasalahan yang menyebabkan adanya kesenjangan antara wanita dan laki-laki di berbagai sektor sehingga mereka dapat menemukan rencana atau solusi dari permasalahan tersebut
- d. Partisipasi atau mobilisasi, di mana wanita mampu membentuk kelompok yang secara bersama-sama dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sekaligus merumuskan kebijakan desa guna menghilangkan diskriminasi
- e. Kontrol, pada tingkatan ini wanita memiliki kontrol yang sama dengan laki-laki terkait dengan sumber daya, proses, maupun hasil pembangunan desa (Ascholani, 2020).

Adapun salah satu program desa yang dibentuk untuk meningkatkan pemberdayaan wanita adalah Kelompok Wanita Tani.

- a. Definisi Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani sendiri merupakan wadah perkumpulan wanita yang bekerja sebagai petani, isteri seorang petani, maupun wanita yang melakukan kegiatan di bidang

pertanian. Kelompok tersebut dibentuk atas dasar keserasian, keselarasan, serta kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber daya pertanian guna meningkatkan potensi, kreativitas, produktivitas, dan kesejahteraan anggotanya. Hadirnya Kelompok Wanita Tani diharapkan mampu menjadi penggerak dan penambah wawasan maupun inovasi ke masyarakat khususnya yang bekerja di bidang pertanian dalam pengelolaan dan pemasaran produk hasil pertanian yang lebih baik. Kelompok wanita tani tidak hanya berkontribusi pada pertanian tetapi juga mampu memberikan dampak positif guna meningkatkan perekonomian keluarga (Camalian & Setiawan, 2017).

b. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dilakukan agar kelompok tersebut memiliki kemandirian untuk dapat menghadapi permasalahan. Jadi, dapat dikatakan Kelompok Wanita Tani yang berdaya artinya kelompok tersebut mampu secara mandiri menghadapi permasalahan dalam usaha tani guna mencapai tujuan atau kesejahteraan kelompok. Tujuan pemberdayaan lebih diarahkan pada perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan pada petani itu sendiri (*better living*) (Mardikanto & Poerwoko, 2017).

Adapun beberapa hal yang dapat menunjukkan berdayanya suatu Kelompok Wanita Tani, di antaranya :

1) Peningkatan wawasan dan keterampilan

Meningkatnya wawasan mengenai pertanian serta keterampilan dalam menjalankan usaha tani merupakan tujuan utama dari dibentuknya Kelompok Wanita Tani. Kelompok Wanita Tani dapat dikatakan berdaya dengan berdasarkan tingkat wawasan dan keterampilannya ditunjukkan oleh beberapa fungsi, yaitu meliputi :

- a) Fungsi unit produksi, dimaksudkan bahwa KWT mampu menghasilkan produk yang terjamin kualitas, kuantitas, dan stabilitas harga.
- b) Fungsi unit pengelolaan, KWT dapat memanfaatkan teknologi yang ada guna mengelola hasil panen yang lebih baik sehingga akan menambah nilai produk tersebut. Selain itu, KWT dapat membuat atau menciptakan produk terbaru yang kiranya dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam bidang pertanian.
- c) Fungsi unit pemasaran, KWT dapat menjalin kerjasama pada beberapa pihak demi meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Menteri Pertanian, 2013).

2) Peningkatan ekonomi

Melalui peningkatan wawasan dan keterampilan yang diperoleh dapat menghasilkan produk yang jauh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan juga masyarakat sekitar sehingga dapat pula meningkatkan ekonomi keluarga.

3) Kemandirian

Kelompok Wanita Tani dapat dikatakan mandiri apabila :

- a) Ada pertemuan yang diselenggarakan secara berkala
- b) Mempunyai rencana atau strategi kelompok yang telah disusun atas kesepakatan bersama
- c) Memiliki catatan atau administrasi termasuk laporan keuangan
- d) Memiliki aturan yang telah disepakati untuk dipatuhi bersama
- e) Kerjasama antar anggota yang dapat meningkatkan keharmonisan kelompok
- f) Adanya kejelasan dalam modal usaha, baik dari iuran anggota maupun pihak atau lembaga lainnya.

C. Landasan Teologis

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam. Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan formal khususnya yang berdasarkan prinsip syariah. Baik literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan. Keuangan perlu dikelola dengan baik dan sesuai prinsip Islam untuk memperoleh ridho Allah SWT dan mencapai kesejahteraan. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan atau harta yang baik dan benar menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Furqon (25) Ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Artinya : Dan, orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hamba Allah memiliki harta benda sehingga mereka bernaikah di mana apabila kebutuhannya telah tercukupi, maka mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Nafkah dalam hal ini adalah sunnah bukanlah wajib. Adapun berlebihan dalam nafkah wajib tidak dilarang atau tercela akan tetapi walaupun sedikit harta yang dikeluarkan bersifat haram itulah yang tercela (Shihab, 2002).

2. Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 29-30

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ۖ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)

Artinya : Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terikat di lehermu (tapi) jangan pula terlalu mengulurkan tanganmu karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan

menyempitkannya, dan sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021).

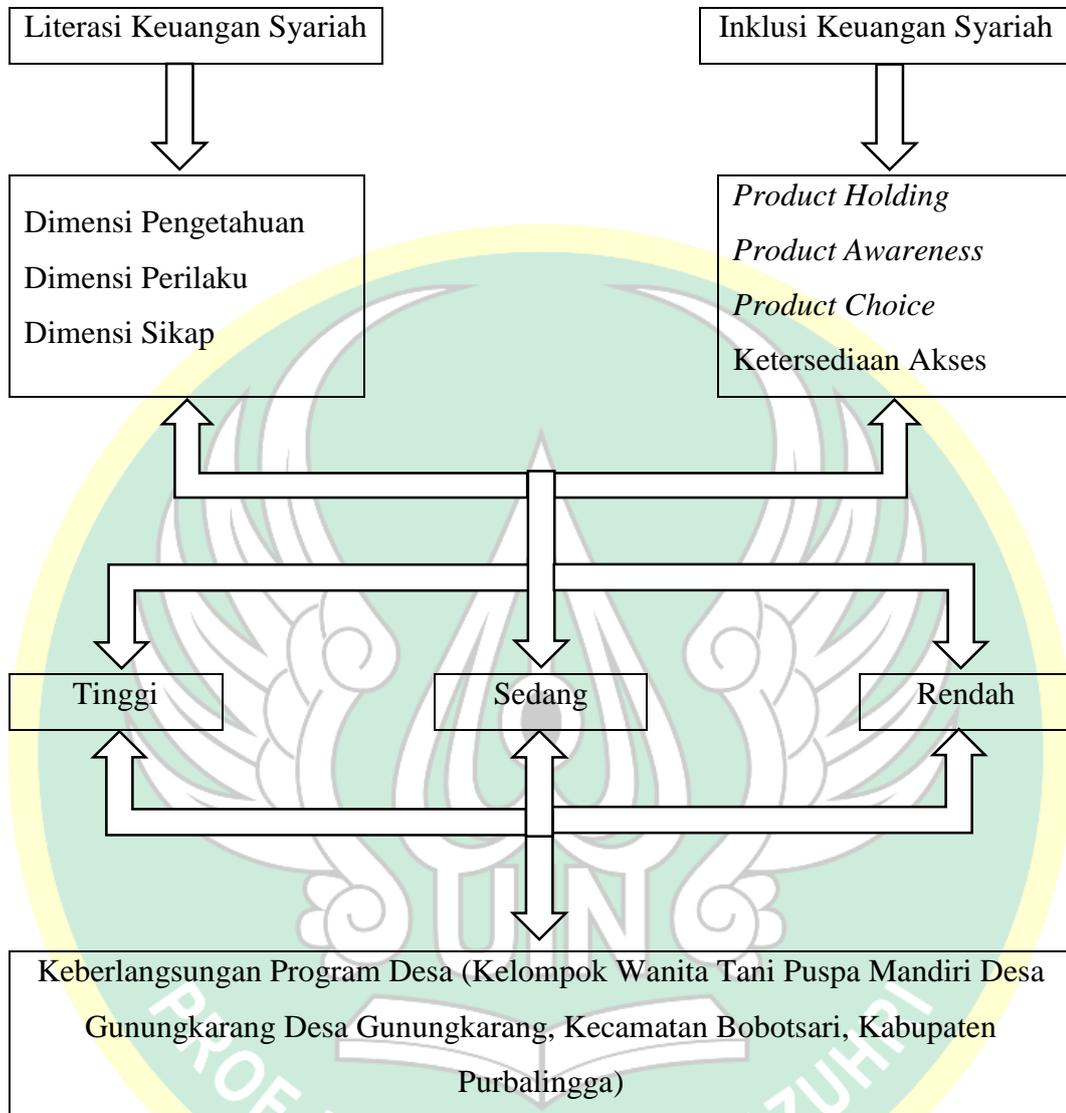
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bersikap ekonomis dimana menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Kikir sendiri dalam hal ini termasuk sifat tercela dan menghamburkan uang secara berlebihan juga termasuk perbuatan atau sifat yang dilarang Allah SWT. Atau dengan kata lain jangan menjadi orang yang kikir dan menolak orang yang meminta bahkan tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu pada orang lain (Shihab, 2002).

Ayat-ayat di atas sebenarnya menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan yang baik. Di mana harta disimpan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun, di samping pemenuhan kebutuhan, harta juga perlu untuk didistribusikan secara adil agar tidak berputar atau beredar di kelompok tertentu saja. Sehingga keadilan dapat ditegakkan dan dirasakan oleh semua kalangan. Oleh karena itu diperlukannya peningkatan literasi keuangan syariah agar individu mampu dalam mengelola keuangan yang baik. Inklusi keuangan syariah juga penting supaya harta yang dimiliki dapat mudah dan aman untuk disimpan maupun dikelola kembali melalui produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada keberlangsungan program desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan wanita Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) atau dengan kata lain merupakan penelitian yang dilakukan guna mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan tempat penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang mana menggunakan satu atau lebih dari satu variabelnya dengan tujuan untuk dapat menjelaskan variabel mandiri dan boleh tidak menggunakan hipotesis. Umumnya, penelitian deskriptif digunakan pada penilaian sikap ataupun pendapat terhadap individu, organisasi, kondisi, maupun suatu prosedur. Pendekatan kuantitatif sendiri digunakan untuk meneliti populasi dengan sampel tertentu, kumpulan data yang menggunakan instrument penelitian, analisis data dengan sifat statistik atau kuantitatif yang bertujuan meneliti atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini menggambarkan objek-objek penelitian berdasarkan fakta-fakta, dianalisis, dan diinterpretasikan berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk angka (Siregar, 2014).

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang dimulai pada bulan Januari tahun 2022 sampai data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Alasan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah terdapat kelompok tani yang cukup unik, yakni mereka mayoritas beranggotakan wanita sesuai dengan nama

kelompoknya yaitu KWT (Kelompok Wanita Tani) Puspa Mandiri. Anggotanya secara terorganisir menanam beberapa tanaman seperti sayur-sayuran, palawija, buah-buahan, bahkan berencana ke tanaman pangan pokok atau padi. Namun, dalam kelompok tersebut masih terdapat beberapa masalah. Pada bagian keuangan, dikelola oleh seseorang yang dipercaya amanah akan tetapi seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan nominal di laporan keuangan serta untuk rencana penanaman tanaman pokok masih terkendala modal baik untuk benih, pengolahan hasil pangan, maupun alat-alat penunjang aktivitas pertanian.

Di sisi lain, Bobotsari dikenal sebagai kota dagang yang menjadi lalu lintas perdagangan tidak terkecuali produk pertanian dan hanya ada satu KWT yang dinilai aktif serta menunjukkan *progress* yang baik yaitu Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri. Wilayahnya juga cukup dekat serta mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

Berikut merupakan rincian populasi dan sampel pada penelitian ini :

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang mana terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

2. Sampel

Sampel dalam sebuah penelitian diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang mana dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Jumlah sampel akan dapat ditentukan melalui 2 teknik pengambilan sampel yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini

adalah *Nonprobability Sampling* di mana merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *Nonprobability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling* jenuh. *Sampling* jenuh diartikan sebagai teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik tersebut dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Atau dengan kata lain sampel jenuh disebut sebagai sensus (semua anggota populasi dijadikan sampel).

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan, maka sampel dari penelitian ini adalah keseluruhan populasi atau semua anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang beranggotakan sekitar 23 orang.

D. Variabel Dan Indikator Penelitian

Variabel menurut Sugiyono didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apapun di mana ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti atau dipelajari sehingga mampu memperoleh informasi terkait yang kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Adapun variabel dan indikator dalam penelitian ini meliputi :

1. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan diartikan sebagai rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi sikap serta perilaku individu guna meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam. Pada variabel ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. Tingkat literasi keuangan akan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu literasi keuangan tinggi

(*well literate*), literasi keuangan sedang (*sufficient literate*), dan literasi keuangan rendah (*less literate*).

2. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan yaitu akses bagi setiap orang untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan baik melalui transaksi pembayaran, pembiayaan, tabungan, maupun asuransi secara efektif dan berkelanjutan. Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan formal khususnya yang berdasarkan prinsip syariah. Pada variabel ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. Tingkat inklusi keuangan akan dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu inklusi keuangan tinggi, inklusi keuangan sedang, dan inklusi keuangan rendah.

Berdasarkan penjabaran di atas, guna mempermudah pembaca dalam memahami beberapa variabel tersebut beserta indikatornya, maka peneliti rangkum menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator
Literasi Keuangan Syariah	Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola	Pengetahuan	1. Pengetahuan dasar penyusunan laporan keuangan atau anggaran belanja 2. Pengetahuan pengelolaan keuangan 3. Pengetahuan definisi umum

	<p>keuangan menurut ajaran Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).</p>		<p>lembaga keuangan syariah</p> <p>4. Pengetahuan produk dan jasa lembaga keuangan syariah</p>
		<p>Perilaku</p>	<p>1. Perilaku manajemen atau penganggaran keuangan</p> <p>2. Pertimbangan dalam pembelian atau pembayaran tagihan</p> <p>3. Perilaku pengawasan pengelolaan keuangan jangka panjang</p> <p>4. Perilaku penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan</p>
		<p>Sikap</p>	<p>1. Perlunya memahami dasar pengelolaan keuangan</p> <p>2. Pentingnya rencana anggaran belanja</p>

			<p>atau laporan keuangan</p> <p>3. Preferensi dalam menghabiskan pendapatan atau uang yang dimiliki</p> <p>4. Sikap dalam menghadapi permasalahan keuangan</p>
Inklusi Keuangan Syariah	<p>Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan formal khususnya yang berdasarkan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).</p>	<i>Product holding</i>	<p>1. Kepemilikan produk tabungan</p> <p>2. Kepemilikan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah</p> <p>3. Kepemilikan fasilitas pembayaran (kartu kredit, rekening giro, maupun uang elektronik)</p> <p>4. Kepemilikan produk asuransi ataupun dana pensiun</p>
		<i>Product awareness</i>	<p>1. Mengetahui keberadaan produk dan jasa lembaga keuangan syariah</p>

			<p>2. Kesadaran fungsi dari produk penghimpunan dana</p> <p>3. Kesadaran fungsi dari produk penyaluran dana</p> <p>4. Kesadaran akan pentingnya menggunakan produk atau jasa lembaga keuangan syariah</p>
		<i>Product choice</i>	<p>1. Pemilihan jenis lembaga keuangan syariah</p> <p>2. Pemilihan produk penghimpunan dana</p> <p>3. Pemilihan produk penyaluran dana</p> <p>4. Pemilihan jasa lainnya pada lembaga keuangan syariah</p>
		Ketersediaan akses	<p>1. Keterjangkauan lembaga keuangan syariah</p> <p>2. Keterjangkauan biaya pada produk</p>

			<p>dan atau jasa lembaga keuangan syariah</p> <p>3. Ketersediaan fasilitas mesin ATM</p> <p>4. Kemudahan dalam pembukaan rekening</p>
--	--	--	---

E. Pengumpulan Data Penelitian

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu guna membantu peneliti memperoleh data yang akan diolah menyesuaikan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun beberapa teknik yang digunakan yaitu :

1. Teknik Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada responden (Sugiyono, 2019). Teknik ini dapat dikatakan lebih efisien. Kuesioner dalam penelitian ini akan disebar secara offline yang dilakukan dengan membagikan secara langsung hardfile kuesioner kepada responden. Isi dari kuesioner tersebut berupa data identitas responden dan daftar pertanyaan dengan dilengkapi ceklist pada skala penilaian. Peneliti dapat menggunakan data tersebut untuk selanjutnya dianalisis. Responden dari kuesioner pada penelitian ini adalah anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Pada teknik ini, kuesioner yang telah disusun akan diuji kelayakannya melalui :

a. Uji Validitas

Uji ini dilakukan guna mengukur tingkat kevalidan instrumen penelitian atau dalam hal ini berupa kuesioner (Saifuddin, 2012). Validitas akan memastikan pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner sudah sesuai atau dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat dinyatakan valid karena sudah mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang hendak diteliti. Kevalidan suatu instrumen dalam bentuk butir pertanyaan dapat dilihat dari tabel *Correlations* pada *Pearson Correlation* dengan simbol bintang (*) yang tercantum.

Pertanyaan variable dikatakan valid apabila nilai signifikansi yaitu $\alpha < 0,05$. Syarat uji validitas yaitu :

- 1) Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka dikategorikan valid, begitu sebaliknya
- 2) Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$, maka dikategorikan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur suatu instrumen yang merupakan indikator dari variabel penelitian. Kuesioner sebagai instrument dalam hal ini dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden akan pertanyaan yang diajukan tetap atau konsisten. Konsisten dalam hal ini diartikan bahwa suatu pengukuran apabila diukur ulang hasilnya tidak berbeda dari waktu ke waktu (Bawono, 2006).

Instrument penelitian dikatakan reliable apabila *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian. Syarat uji reabilitas yaitu :

- 1) Jika nilai $\text{Alpha} \geq r \text{ tabel}$ maka instrument penelitian dikatakan reliabel.
- 2) Jika nilai $\text{Alpha} \leq r \text{ table}$ maka instrument dikatakan tidak reliabel.

2. Teknik Observasi

Teknik ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi dari aspek kognitif maupun non kognitif, sikap, minat, dan hal-ha yang terkait dengan situasi responden. Observasi pada penelitian ini lebih ke arah mengamati secara langsung aktivitas atau kondisi dari responden.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti memerlukan beberapa data yang ada pada dokumen-dokumen lainnya guna menunjang penelitian ini. Buku, catatan, laporan, maupun literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Analisis Data Penelitian

Analisis data digunakan untuk mengolah data penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif di mana data penelitian akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis tersebut nantinya akan menjelaskan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum).

Perhitungan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah menggunakan rumus yang sama, yang membedakan adalah komponen pada masing-masing variabel (jumlah jawaban responden pada variabel literasi keuangan atau inklusi keuangan syariah). Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks LK / IK} = \frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah total skor}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah dapat menyesuaikan antara hasil dari indeks masing-

masing variabel dengan tabel kriteria *analysis deskriptif presentase* (Chen & Volpe, 1998). Rincian tabel kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Analysis Deskriptive Presentase

No	Interval (%)	Kategori	Keterangan
1.	<60	Rendah	Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang rendah di mana masih rendahnya pengetahuan tentang keuangan. Pihak yang masuk dalam kategori ini cenderung membuat keputusan keuangan dan perencanaan keuangan yang salah. Dalam tingkatan ini masyarakat hanya mengetahui tentang lembaga keuangan beserta produk dan atau jasa yang ditawarkannya. Bahkan untuk beberapa kasus masyarakat tidak memiliki pengetahuan serta keyakinan terhadap lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga tidak terampil dalam memanfaatkan produk dan atau jasa keuangan.
2.	60≤80	Sedang	Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang sedang. Pada tingkatan ini, individu sudah memiliki pengetahuan keuangan akan tetapi masih belum

			<p>terampil dalam mengelola keuangan. Masyarakat mampu memahami dan memiliki keyakinan akan lembaga keuangan termasuk fasilitas, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada tingkatan ini, masyarakat belum terampil dalam menggunakan produk dan atau jasa keuangan.</p>
3.	>80	Tinggi	<p>Kategori ini berarti pihak tersebut masuk dalam tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang tinggi. Pihak yang termasuk dalam tingkatan ini memiliki pengetahuan keuangan yang baik. Pada tingkat ini, pembuatan keputusan keuangan dan perencanaan keuangan sudah baik serta mampu dipertanggung jawabkan. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga keuangan beserta produk dan atau jasa yang ditawarkannya. Fasilitas, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban juga dipahami oleh masyarakat sehingga mereka dapat dikatakan telah terampil dalam menggunakan produk dan atau jasa keuangan tersebut.</p>

Sumber : (Chen & Volpe, 1998)

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Potret Wilayah Penelitian

Gunungkarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Terdiri atas 2 Kadus, 4 RW, dan 13 RT yang dihuni oleh warga sebanyak 2.275 jiwa (1.197 perempuan dan 1.078 laki-laki) atau dikelompokkan dalam 654 kelompok keluarga. Desa tersebut memiliki luas wilayah sebesar 132,597 Ha dengan rincian pemanfaatan tanah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pemanfaatan Tanah

No	Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Tanah Sawah		49,393
	Irigasi Sederhana	41,1	
	Tadah Hujan	8,293	
2.	Tanah Kering		83,204
	Pekarangan	13,784	
	Tegalan	58,54	
	Kolam	0,11	
	Dan lain-lain	10,77	
Total			132,597

Seperti yang tertera pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa pertanian menjadi sektor yang potensial. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yang terdiri dari 5 sub sektor yakni tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Adapun komoditas yang diusahakan meliputi :

- a. Tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, suweg, ganyong, dan uwi
- b. Hortikultura seperti berbagai macam sayuran dan buah-buahan

- c. Perikanan yang fokus pada kolam pembesaran
 - d. Peternakan yang meliputi unggas, kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya.
2. Sejarah dan Profil Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri menurut Surat Keputusan Kepala Desa Gunungkarang Nomor 412.2/2/I/2020 tentang Pengukuhan Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspa Mandiri Desa Gunungkarang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 7 Januari 2020. Kelompok ini berlokasi di Dusun 2 RT 03 RW 04 Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dengan luas pekarangan sebesar 0,5 Ha. Lahan pekarangan yang ada di rumah tangga selama ini dimanfaatkan untuk tanaman pekarangan. Namun, dari 30 rumah tangga belum semuanya tertata dengan baik, padahal lahan pekarangan yang ada sangat berpotensi untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan karena ketersediaan air cukup. Oleh karena itu terbentuknya ini didukung dengan keinginan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kemauan dan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

Anggota aktif dalam kelompok wanita tani ini sebanyak 23 orang yang berasal dari 30 rumah tangga yang saling berdekatan dalam satu kawasan. Berikut merupakan informasi mengenai anggota aktif dalam Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga:

Tabel 4.2

Profil Anggota Aktif Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

No	Nama	Alamat (RT/RW)	Luas Lahan (meter)
1.	Daryati	03/04	182
2.	Dasiyah	03/04	140
3.	Dawilah	03/04	250
4.	Eka Apriliani	02/04	196

5.	Karni	03/04	250
6.	Khosiah	02/04	210
7.	Kusmiyati	02/04	182
8.	Kustini	03/04	280
9.	Martini	03/04	250
10.	Nugraeni	02/04	250
11.	Priyani Ernawati	01/04	154
12.	Puji Astuti	02/04	280
13.	Robingah	03/04	250
14.	Solati	03/04	182
15.	Sumarti	02/04	140
16.	Suminah	01/04	280
17.	Supriyati	02/04	140
18.	Suryati	03/04	250
19.	Sutrimah	02/04	210
20.	Suwarti	03/04	280
21.	Tasiah	01/04	210
22.	Warsini	03/04	250
23.	Watinah	01/04	210

3. Visi dan Misi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

Visi dari Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yaitu “Terwujudnya usaha tani kelompok yang makmur dan sejahtera lewat potensi dan kreativitas wanita tani”. Sedangkan untuk misinya meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras
- b. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan

- pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk konsumsi keluarga sehari-hari
- c. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
4. Tujuan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

Tujuan dibentuknya KWT Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga meliputi :

- a. Menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani kelompok dan anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya
 - b. Menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa pengurus beserta anggota KWT untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia
 - c. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha lainnya.
5. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

Adapun susunan organisasi dalam Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Dedi Budiono
- b. Pendamping : Riyati
- c. Ketua : Suryati
- d. Sekretaris : Nugraeni
- e. Bendahara : Robingah
- f. Seksi-seksi
 - 1) Pertanaman : Warsini
 - 2) Demplot : Martini
 - 3) Pasca Panen dan Pemasaran : Suwarti

4) Kebun Bibit Desa : Solati

6. Kegiatan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri

Kelompok tersebut rutin mengadakan pertemuan setiap bulan pada tanggal 12. Pada pertemuan tersebut akan dibahas permasalahan mengenai budidaya tanaman pekarangan seperti benih yang ditanam, pemberian air pada musim kemarau, penggunaan pupuk organik, maupun evaluasi setelah panen. Selain itu diadakan pula praktik yang meliputi pembibitan, penanaman, dan pupuk organik. Setiap anggota wajib untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, umbi, dan buah) maupun memelihara ternak dan ikan. Tujuannya adalah mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil panen diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga yang bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan atau disumbangkan pada anggota kelompok ataupun dijual secara bersama-sama oleh kelompok.

Pada tahun 2020 dengan dukungan dari pemerintah desa, kelompok ini berinisiatif untuk membuat demplot guna memenuhi kebutuhan bibit tanaman untuk anggota atau dijual kepada masyarakat lain dan petani yang membutuhkan. Kegiatan pemanfaatan pekarangan oleh KWT sampai sekarang masih tetap berjalan, namun karena adanya hujan besar dan angin maka kebun bibit desa roboh dan rusak parah. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan kembali agar kegiatan pemanfaatan pekarangan dapat terus berjalan sehingga mampu mendukung kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan.

Seperti kelompok pada umumnya, KWT ini juga memiliki beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Intensifikasi pemanfaatan pekarangan belum dilaksanakan secara maksimal atau belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
- b. Masih diusahakan komoditas kehutanan di pekarangan

- c. Belum tertatanya tanaman, ternak, dan ikan sehingga mengganggu kelestarian lingkungan hidup
- d. Pengolahan pangan masih berasal dari luar
- e. Kurangnya permodalan untuk pengolahan hasil pangan.

B. Deskripsi Data

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara *offline* dengan membagikan secara langsung *hardfile* kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 23 orang. Sesuai dengan nama kelompok tersebut, dapat dinyatakan bahwa 100% responden berjenis kelamin perempuan. Dari 23 kuesioner yang disebar diisi semua sesuai dengan jumlah responden dan tidak ditemukan data yang rusak.

Pengisian awal kuesioner meliputi beberapa pertanyaan seputar profil dari responden guna melengkapi serta memperkuat penelitian ini. Beberapa karakteristik dicantumkan seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan pengeluaran. Berikut merupakan uraian dari karakteristik responden penelitian :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Data dari 23 responden terkait karakteristik menurut usia terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	25-35	4	17,4
2.	36-45	3	13
3.	46-55	9	39,1
4.	56-65	6	26,1
5.	66-75	1	4,3

Total	23	100
-------	----	-----

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa dari total 23 responden sebanyak 17,4% atau 4 orang berada di rentang usia 25-25 tahun. Pada rentang usia 36-45 tahun sebanyak 3 orang atau dengan presentase 13%. Rentang usia 46-55 tahun dengan jumlah responden terbanyak yaitu 9 orang atau 39,1%. 6 orang dengan presentase 26,1% yang termasuk dalam rentang 56-65 tahun. Terakhir dengan frekuensi yang paling sedikit yaitu sebanyak 1 orang atau 4,3% termasuk dalam kelompok usia 66-75 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data dari 23 responden terkait karakteristik menurut tingkat pendidikan terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD/Sederajat	16	69,6
2.	SMP/Sederajat	3	13
3.	SMA/Sederajat	3	13
4.	Sarjana	1	4,3
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar responden memiliki riwayat pendidikan sampai Sekolah Dasar/ sederajat dengan frekuensi 16 orang atau 69,6%. Pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat memiliki frekuensi yang sama yakni 3 orang dengan presentase 13%. Sedangkan responden yang berpendidikan sarjana hanya 1 orang atau 4,3%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Data dari 23 responden terkait karakteristik menurut pekerjaan terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS	1	4,3
2.	Wirausaha	2	8,7
3.	Ibu Rumah Tangga	20	87
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, responden yang bekerja sebagai PNS memiliki kuantitas yang paling sedikit yaitu 1 orang atau 4,3%. Responden yang berwirausaha berfrekuensi 2 orang atau 8,7%. Sedangkan untuk ibu rumah tangga memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu 20 orang dengan presentase 87%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Data dari 23 responden terkait karakteristik menurut tingkat pendapatan terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	<Rp1.000.000,00	20	87
2.	Rp1.000.000,00-Rp3.000.000,00	3	13
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendapatan kurang dari Rp1.000.000,00 memiliki frekuensi yang paling banyak yakni 20 orang dengan presentase 87%. Sedangkan untuk tingkat pendapatan dari Rp1.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 berfrekuensi 3 orang atau 13% dari total responden

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

Data dari 23 responden terkait karakteristik menurut tingkat pengeluaran terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp1.000.000,00-Rp3.000.000,00	22	95,7
2.	Rp3.000.000,00-Rp5.000.000,00	1	4,3
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, untuk tingkat pengeluaran mulai dari Rp1.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 22 orang dengan presentase 95,7%. Sedangkan 1 orang responden atau 4,3% berada pada tingkat pendapatan Rp3.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00.

C. Hasil Uji Kualitas Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya akan diolah untuk diuji kualitas atau kelayakannya. Data tersebut diolah dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS Statistics Version 2021* dengan taraf kepercayaan (α) 5%. Pada tahap ini terdapat 2 jenis uji yakni validitas dan reliabilitas. Melalui model statistik deskriptif, berikut merupakan penjabaran dari kedua uji kualitas data :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur kevalidan instrumen penelitian agar memperoleh data yang tepat dari variabel yang hendak diteliti atau dengan kata lain pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner sudah sesuai. Data dinyatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai r hitung lebih besar sama dari r tabel. Dalam penelitian ini, nilai r tabel sebesar 0,413. Adapun hasil uji validitas pada kedua variabel penelitian adalah sebagai berikut :

a. Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Syariah

Dari total pertanyaan sebanyak 18 butir soal mengenai literasi keuangan syariah dengan 3 dimensi (pengetahuan, sikap, dan

perilaku) yang dibagikan pada 23 responden, berikut merupakan tabel dari uji validitasnya :

Tabel 4.8

Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Syariah

No	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	LKS1	0,745	0,413	Valid
2.	LKS2	0,642	0,413	Valid
3.	LKS3	0,874	0,413	Valid
4.	LKS4	0,920	0,413	Valid
5.	LKS5	0,497	0,413	Valid
6.	LKS6	0,676	0,413	Valid
7.	LKS7	0,776	0,413	Valid
8.	LKS8	0,480	0,413	Valid
9.	LKS9	0,648	0,413	Valid
10.	LKS10	0,840	0,413	Valid
11.	LKS11	0,856	0,413	Valid
12.	LKS12	0,638	0,413	Valid
13.	LKS13	0,507	0,413	Valid
14.	LKS14	0,638	0,413	Valid
15.	LKS15	0,554	0,413	Valid
16.	LKS16	0,920	0,413	Valid
17.	LKS17	0,874	0,413	Valid
18.	LKS18	0,679	0,413	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, semua item pertanyaan pada instrumen variabel literasi keuangan syariah dinyatakan valid. Hal tersebut ditunjukkan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel, di mana data dinilai valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

b. Uji Validitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah

Dari total pertanyaan sebanyak 17 butir soal mengenai inklusi keuangan syariah yang memuat 4 dimensi (*product holding*, *product awareness*, *product choice*, dan ketersediaan akses) di mana instrumen tersebut dibagikan kepada 23 responden, berikut merupakan tabel dari uji validitasnya :

Tabel 4.9

Uji Validitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah

No	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	IKS1	0,954	0,413	Valid
2.	IKS2	0,954	0,413	Valid
3.	IKS3	0,822	0,413	Valid
4.	IKS4	0,954	0,413	Valid
5.	IKS5	0,954	0,413	Valid
6.	IKS6	0,782	0,413	Valid
7.	IKS7	0,782	0,413	Valid
8.	IKS8	0,782	0,413	Valid
9.	IKS9	0,579	0,413	Valid
10.	IKS10	0,579	0,413	Valid
11.	IKS11	0,954	0,413	Valid
12.	IKS12	0,954	0,413	Valid
13.	IKS13	0,954	0,413	Valid
14.	IKS14	0,499	0,413	Valid
15.	IKS15	0,433	0,413	Valid
16.	IKS16	0,714	0,413	Valid
17.	IKS17	0,832	0,413	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, semua item pertanyaan pada instrumen variabel inklusi keuangan syariah dinyatakan valid. Hal tersebut ditunjukkan dengan membandingkan nilai r hitung dan r

tabel, di mana data dinilai valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk dapat mengukur instrumen yang merupakan indikator dari variabel penelitian. Instrumen yang *reliable* menunjukkan bahwa jawaban dari responden pada setiap pertanyaan yang diajukan akan tetap atau konsisten (hasilnya tidak berbeda apabila diukur ulang). Data dinilai reliabel *reliable* apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Adapun hasil uji validitas pada kedua variabel penelitian adalah sebagai berikut :

a. Uji Reliabilitas Variabel Literasi Keuangan Syariah

Dari total item pertanyaan sebanyak 18 butir soal yang dibagikan kepada 23 responden, berikut merupakan tabel dari uji reliabilitas pada variabel literasi keuangan syariah :

Tabel 4.10

Uji Reliabilitas Variabel Literasi Keuangan Syariah

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Literasi Keuangan Syariah	18	0,94	<i>Reliable</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, data pada variabel literasi keuangan syariah dapat dinyatakan *reliable* atau konsisten karena nilai *Cronbach's Alpha* (0,94) lebih besar dari 0,60.

b. Uji Reliabilitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah

Dari total item pertanyaan sebanyak 17 butir soal yang dibagikan kepada 23 responden, berikut merupakan tabel dari uji reliabilitas pada variabel inklusi keuangan syariah :

Tabel 4.11

Uji Reliabilitas Variabel Inklusi Keuangan Syariah

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
----------	-------------	-------------------------	------------

Inklusi Keuangan Syariah	17	0,958	<i>Reliable</i>
--------------------------	----	-------	-----------------

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel di atas, data pada variabel inklusi keuangan syariah dapat dinyatakan *reliable* atau konsisten karena nilai *Cronbach's Alpha* (0,958) lebih besar dari 0,60.

D. Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif di mana data penelitian akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul dari responden atau dalam hal ini anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Hasil dari pengolahan data statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, jumlah, rata-rata, dan standar deviasi nantinya akan diperlukan untuk menghitung indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah. Perhitungan indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah menggunakan rumus yang sama, pembeda antara keduanya adalah dari komponen atau indikator masing-masing variabel. Adapun rumus perhitungannya yaitu :

$$\text{Indeks LKS/IKS} = \frac{\text{Jumlah Total Jawaban Responden}}{\text{Jumlah Total Skor}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan indeks masing-masing variabel kemudian dikategorikan yang menyesuaikan tabel kriteria *analysis descriptive presentase*, dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12

Kriteria Analysis Deskriptive Presentase

No	Kategori	Interval Data (%)
1.	Rendah	<60
2.	Sedang	60≤80
3.	Tinggi	>80

Sumber : (Chen & Volpe, 1998)

Adapun rincian perhitungan indeks untuk variabel literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah yaitu :

1. Indeks Literasi Keuangan Syariah

Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari 23 responden untuk variabel literasi keuangan syariah yang meliputi 18 pertanyaan di mana memuat 3 dimensi yaitu pengetahuan, perilaku, dan sikap :

Tabel 4.13

Analisis Statistik Deskriptif Literasi Keuangan Syariah

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
Literasi Keuangan Syariah	23	1	18	254	11,04	5,819
Valid N (listwise)	23					

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, variabel literasi keuangan syariah dari 23 responden memiliki jawaban dengan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum jawaban sebesar 18, rata-rata jawaban bernilai 11,04, dan nilai standar deviasi sebesar 5,819. Adapun persentase dari masing-masing dimensi dalam literasi keuangan syariah yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Persentase Dimensi Literasi Keuangan Syariah

No	Dimensi	Nilai	Persentase (%)
1.	Pengetahuan	67	26,4
2.	Perilaku	107	42,1
3.	Sikap	80	31,5
Total		254	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Dimensi yang mendapatkan nilai tertinggi adalah dimensi perilaku dengan persentase sebesar 42,1%, kemudian disusul oleh dimensi sikap sebesar 31,5%. Dimensi yang memperoleh nilai terendah adalah dimensi pengetahuan dengan persentase sebesar 26,4%.

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka indeks literasi keuangan syariah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Literasi Keuangan Syariah} = \frac{254}{414} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Literasi Keuangan Syariah} = 61,35\%$$

Dengan nilai indeks literasi keuangan syariah sebesar 61,35%, maka literasi keuangan syariah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori sedang.

Selain dikategorikan secara keseluruhan, berikut merupakan data kategori literasi keuangan syariah pada anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga secara parsial :

Tabel 4.15
Persentase Responden Berdasarkan Kategori Literasi Keuangan Syariah

No	Kategori (Interval)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rendah (<60)	8	34,8
2.	Sedang (60≤80)	7	30,4
3.	Tinggi (>80)	8	34,8
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak 8 responden atau sekitar 34,8% termasuk dalam kategori literasi keuangan syariah yang rendah. Pada kategori literasi keuangan syariah yang sedang memiliki frekuensi 7 orang atau 30,4%. Sedangkan literasi keuangan syariah yang

termasuk dalam kategori tinggi memiliki kuantitas sebanyak 8 orang atau dengan persentase 34,8%.

Terdapat pula kategori tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan karakteristik dari responden yang meliputi :

- a. Berdasarkan Usia

Tabel 4.16

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Usia

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	25-35	93,06	Tinggi (>80)
2.	36-45	75,93	Sedang ($60 \leq 80$)
3.	46-55	75,31	Sedang ($60 \leq 80$)
4.	56-65	21,30	Rendah (<60)
5.	66-75	5,56	Rendah (<60)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, pada rentang usia 25-35 tahun memiliki tingkat literasi keuangan syariah tinggi dengan indeks sebesar 93,06%. Sedangkan untuk usia 36-45 tahun dan 46-55 tahun berada pada tingkat sedang dengan indeks literasi keuangan syariah masing-masing sebesar 75,93% dan 75,31%. Adapun pada rentang usia 56-65 tahun dan 66-75 tahun memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah dengan indeks 21,30% dan 5,56%.

- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.17

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	SD/SEDERAJAT	48,61	Rendah (<60)
2.	SMP/SEDERAJAT	92,59	Tinggi (>80)
3.	SMA/SEDERAJAT	92,59	Tinggi (>80)
4.	SARJANA	80,78	Tinggi (>80)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, pada tingkat pendidikan SD/ sederajat memiliki tingkat literasi keuangan syariah rendah dengan indeks sebesar 48,61%. Sedangkan untuk kategori tingkat literasi keuangan syariah tinggi ada pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat (indeks 92,59%), SMA/ sederajat (indeks 92,59%), dan Sarjana (80,78%).

c. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.18

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Pekerjaan

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	PNS	94,44	Tinggi (>80)
2.	Wirausaha	94,44	Tinggi (>80)
3.	Ibu Rumah Tangga	56,39	Rendah (<60)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, tingkat literasi keuangan syariah untuk PNS dan wirausaha berada pada kategori tinggi dengan indeks sebesar 94,44%. Sedangkan untuk kategori tingkat literasi keuangan syariah ibu rumah tangga berada pada tingkat rendah dengan indeks sebesar 56,39%.

d. Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

Tabel 4.19

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
Pendapatan	<Rp 1.000.000,00	56,39	Rendah (<60)
	Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00	94,44	Tinggi (>80)
Pengeluaran	Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00	59,85	Rendah (<60)
	Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00	94,44	Tinggi (>80)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, literasi keuangan syariah kategori rendah terdapat pada kelompok tingkat pendapatan <Rp 1.000.000,00 (indeks 56,39%) dan pengeluaran Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 (indeks 59,85%). Sedangkan untuk kategori literasi keuangan syariah tinggi ada pada tingkat pendapatan Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 dan pengeluaran Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 dengan indeks yang sama yakni sebesar 94,44%.

2. Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari 23 responden untuk variabel inklusi keuangan syariah yang meliputi 17 pertanyaan di mana memuat 4 dimensi yaitu *product holding*, *product awareness*, *product choice*, dan ketersediaan akses :

Tabel 4.20

Analisis Statistik Deskriptif Inklusi Keuangan Syariah

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
Inklusi Keuangan Syariah	23	1	17	117	5,09	5,736
Valid N (listwise)	23					

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, variabel inklusi keuangan syariah dari 23 responden memiliki jawaban dengan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum jawaban sebesar 17, rata-rata jawaban bernilai 5,09, dan nilai standar deviasi sebesar 5,736. Adapun persentase dari masing-masing dimensi dalam inklusi keuangan syariah yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21

Persentase Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

No	Dimensi	Nilai	Persentase (%)
1.	<i>Product Holding</i>	19	16,2

2.	<i>Product Awareness</i>	34	29,1
3.	<i>Product Choice</i>	19	16,2
4.	Ketersediaan Akses	45	38,5
Total		117	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Dimensi dengan persentase tertinggi adalah dimensi ketersediaan akses sebesar 38,5%, diikuti dengan dimensi *product awareness* sebesar 29,1%. Pada dimensi *product holding* dan *product choice* memiliki persentase sama dan yang paling rendah dari semua dimensi pada inklusi keuangan syariah yaitu sebesar 16,2%

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka indeks inklusi keuangan syariah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Inklusi Keuangan Syariah} = \frac{117}{391} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Inklusi Keuangan Syariah} = 29,92\%$$

Dengan nilai indeks inklusi keuangan syariah sebesar 29,92%, maka inklusi keuangan syariah Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori rendah.

Selain dikategorikan secara keseluruhan, berikut merupakan data kategori inklusi keuangan syariah pada anggota Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga secara parsial :

Tabel 4.22

Persentase Responden Berdasarkan Kategori Inklusi Keuangan Syariah

No	Kategori (Interval)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rendah (<60)	19	82,6
2.	Tinggi (>80)	4	17,4
Total		23	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak 19 responden atau sekitar 82,6% termasuk dalam kategori inklusi keuangan syariah yang rendah. Sedangkan inklusi keuangan syariah yang termasuk dalam kategori tinggi memiliki kuantitas sebanyak 4 orang atau dengan persentase 17,4%.

Terdapat pula kategori tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan karakteristik dari responden yang meliputi :

a. Berdasarkan Usia

Tabel 4.23

Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Usia

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	25-35	82,35	Tinggi (>80)
2.	36-45	19,61	Rendah (<60)
3.	46-55	28,10	Rendah (<60)
4.	56-65	6,86	Rendah (<60)
5.	66-75	5,88	Rendah (<60)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, pada rentang usia 25-35 tahun memiliki tingkat inklusi keuangan syariah tinggi dengan indeks sebesar 82,35%. Sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan syariah rendah ada pada rentang usia 36-45 tahun (indeks 19,61%), 46-55 tahun (28,10%), 56-65 tahun (6,86%), dan 66-75 tahun (indeks 5,88%).

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.24

Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	SD/SEDERAJAT	12,13	Rendah (<60)

2.	SMP/SEDERAJAT	78,43	Sedang ($60 \leq 80$)
3.	SMA/SEDERAJAT	76,47	Sedang ($60 \leq 80$)
4.	SARJANA	29,41	Rendah (<60)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, pada tingkat pendidikan SD/ sederajat dan sarjana memiliki tingkat inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks masing-masing sebesar 12,13% dan 29,41%. Sedangkan untuk kategori tingkat inklusi keuangan syariah sedang ada pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat (indeks 78,43%) dan SMA/ sederajat (indeks 76,47%).

c. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.25

Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Pekerjaan

No.	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
1.	PNS	100	Tinggi (>80)
2.	Wirausaha	35,29	Rendah (<60)
3.	Ibu Rumah Tangga	25,88	Rendah (<60)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, tingkat inklusi keuangan syariah untuk PNS berada pada kategori tinggi dengan indeks sebesar 100%. Sedangkan untuk kategori tingkat inklusi keuangan syariah rendah ada pada responden dengan pekerjaan wirausaha (indeks 35,29%) dan ibu rumah tangga (25,88%).

d. Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

Tabel 4.26

Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

	Kriteria	Indeks (%)	Kategori (Interval)
Pendapatan	<Rp 1.000.000,00	25,88	Rendah (<60)
	Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00	56,86	Rendah (<60)

Pengeluaran	Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00	26,74	Rendah (<60)
	Rp 3.000.000,00 - Rp 5.000.000,00	100	Tinggi (>80)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Berdasarkan data dari tabel di atas, baik pada tingkat pendapatan <Rp 1.000.000,00 dan Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 termasuk pada kategori tingkat inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks masing-masing 25,88% dan 56,86%. Sedangkan untuk tingkat pengeluaran Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 masuk dalam kategori inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks sebesar 26,74%. Pada tingkat pengeluaran Rp 3.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 masuk dalam kategori inklusi keuangan syariah tinggi dengan indeks sebesar 100%.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun pembahasan dari hasil analisis data yang dilakukan pada responden yang merupakan anggota aktif Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang meliputi :

1. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam. Dalam konteks pembangunan, literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami mengenai lembaga keuangan syariah akan tetapi juga dapat mengubah serta memperbaiki perilakunya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan. Manfaat dari literasi keuangan syariah dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Misalnya bagi masyarakat, literasi keuangan syariah bermanfaat untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan keuangan dasar syariah sehingga masyarakat dapat merencanakan pengelolaan keuangan dengan lebih baik
- b. Meningkatkan kemampuan dalam memilih dan memanfaatkan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat serta risiko dari masing-masing produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.
- d. Mengurangi risiko kejahatan terkait transaksi keuangan (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Adapun indeks literasi keuangan syariah secara keseluruhan pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap 23 responden menunjukkan persentase sebesar 61,35%. Nilai tersebut diperoleh dari gabungan antara ketiga dimensi dalam literasi keuangan syariah yakni dimensi pengetahuan dengan persentase 26,4%, dimensi perilaku sebesar 42,1%, dan dimensi sikap sebesar 31,5%. Dengan persentase sebesar 61,35%, Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri termasuk dalam kategori sedang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ($60\% \leq 80\%$). Pada tingkatan ini, individu sudah memiliki pengetahuan keuangan akan tetapi masih belum terampil dalam mengelola keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kategori literasi keuangan syariah sedang (*sufficient literate*) masyarakat mampu memahami dan memiliki keyakinan akan lembaga keuangan termasuk fasilitas, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada tingkatan ini, masyarakat belum terampil dalam menggunakan produk dan atau jasa keuangan.

Sedangkan untuk indeks literasi keuangan syariah secara parsial pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang,

Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil sebanyak 8 responden atau sekitar 34,8% termasuk dalam kategori literasi keuangan syariah yang rendah. Pada kategori literasi keuangan syariah yang sedang memiliki frekuensi 7 orang atau 30,4%. Terakhir untuk literasi keuangan syariah yang termasuk dalam kategori tinggi memiliki kuantitas sebanyak 8 orang atau dengan persentase 34,8%.

Selanjutnya untuk tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan usia menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Kategori tingkat literasi keuangan syariah tinggi ada pada rentang usia 25-35 dengan indeks sebesar 93,06%. Kategori tingkat literasi keuangan syariah sedang terdapat pada usia 36-45 tahun (indeks 75,93%) dan 46-55 tahun (indeks 75,31%). Adapun pada rentang usia 56-65 tahun dan 66-75 tahun memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah dengan indeks 21,30% dan 5,56%. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin bertambahnya usia pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan keuangan akan mengalami penurunan. Terlebih pada usia di atas usia produktif kurang memperhatikan perkembangan teknologi dan *update* informasi keuangan terbaru termasuk perkembangan lembaga keuangan syariah sehingga keuangan dikelola secara monoton. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ade dkk (2017) di mana usia berpengaruh signifikan dan bernilai negatif pada literasi keuangan syariah (Marpis, Cholid, & Juwita, 2017). Daya tangkap dan pola pikir akan semakin menurun seiring bertambahnya usia selain itu juga belum adanya perencanaan keuangan yang baik.

Tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD/ sederajat memiliki tingkat literasi keuangan syariah rendah dengan indeks sebesar 48,61%. Sedangkan untuk kategori tingkat literasi keuangan syariah tinggi ada pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat (indeks 92,59%), SMA/ sederajat (indeks 92,59%), dan Sarjana (80,78%). Hal tersebut

dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka penguasaan akan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Ade dkk (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap literasi keuangan syariah (Marpis, Cholid, & Juwita, 2017). Tinggi rendahnya pendidikan tidak menjamin kemampuan pengelolaan keuangan karena tergantung dengan kepribadian serta kemauan individu itu sendiri.

Tingkat literasi keuangan syariah untuk PNS dan wirausaha berada pada kategori tinggi dengan indeks sebesar 94,44%. Umumnya, PNS memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi termasuk keuangan terlebih pada beberapa jabatan di bidang keuangan mengharuskan penguasaan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang baik. Wirausaha juga diharuskan dapat mengelola keuangan dengan baik demi kelangsungan usaha yang dijalanannya. Sedangkan untuk ibu rumah tangga berada pada tingkat literasi keuangan syariah rendah dengan indeks sebesar 56,39%. Hal tersebut dapat terjadi karena ibu rumah tangga hanya mengelola keuangan secara monoton di mana yang terpenting adalah kebutuhan keluarga terpenuhi. Mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengoptimalan uang untuk kegiatan yang produktif serta belum memahami dengan baik produk dan atau jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah.

Terakhir untuk tingkat literasi keuangan syariah akan semakin tinggi sejalan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran yang semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah kategori rendah terdapat pada kelompok tingkat pendapatan <Rp 1.000.000,00 (indeks 56,39%) dan pengeluaran Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 (indeks 59,85%). Sedangkan untuk kategori literasi keuangan syariah tinggi ada pada tingkat pendapatan Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 dan pengeluaran Rp 3.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 dengan indeks yang sama yakni sebesar 94,44%. Semakin besar

pendapatan yang diterima akan semakin kompleks pengelolaan keuangannya, sehingga diperlukannya literasi keuangan syariah yang baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade dkk (2017) tingkat pendapatan berpengaruh pada literasi keuangan syariah. Begitu pula semakin besar pengeluaran maka dibutuhkan penguasaan dan keterampilan dalam mengelola keuangan lebih baik lagi atau dalam hal ini tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Pendapatan dan pengeluaran yang besar pastinya memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat di mana uang yang masuk mampu menutupi uang yang semestinya dikeluarkan bahkan perlu disisihkan untuk keperluan lain di masa yang akan datang.

2. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah agar mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah juga dapat diartikan tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat akan keuangan yang semakin inklusif diantaranya :

- a. Kemudahan akses pelaku usaha dalam meminjam modal pada lembaga keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi
- b. Terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan agar masyarakat golongan menengah ke bawah juga dapat mengakses produk dan atau jasa lembaga keuangan dengan lebih mudah
- c. Meminimalisasi atau bahkan menghilangkan rentenir yang ada di masyarakat karena kemudahan dalam mengakses produk dan atau jasa lembaga keuangan (Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2016).

Adapun indeks inklusi keuangan syariah secara keseluruhan pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan pengolahan data yang dilakukan pada 23 responden menunjukkan persentase sebesar 29,92%. Nilai tersebut diperoleh dari gabungan antara keempat dimensi dalam inklusi keuangan syariah yakni *product holding* (16,2%), *product awareness* (29,1%), *product choice* (16,2%), dan ketersediaan akses (38,5%). Dengan persentase sebesar 29,92%, Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri termasuk dalam kategori rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (<60%). Dalam tingkatan ini masyarakat hanya mengetahui tentang lembaga keuangan beserta produk dan atau jasa yang ditawarkannya. Bahkan untuk beberapa kasus masyarakat tidak memiliki pengetahuan serta keyakinan terhadap lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga tidak terampil dalam memanfaatkan produk dan atau jasa keuangan. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan syariah secara parsial pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri menunjukkan hasil sebanyak 19 responden atau sekitar 82,6% termasuk dalam kategori inklusi keuangan syariah yang rendah. Kemudian, inklusi keuangan syariah yang termasuk dalam kategori tinggi memiliki kuantitas sebanyak 4 orang atau dengan persentase 17,4%.

Selanjutnya untuk tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan usia menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Kategori tingkat inklusi keuangan syariah tinggi ada pada rentang usia 25-35 dengan indeks sebesar 82,35%. Kategori tingkat inklusi keuangan syariah rendah ada pada rentang usia 36-45 tahun (indeks 19,61%), 46-55 tahun (28,10%), 56-65 tahun (6,86%), dan 66-75 tahun (indeks 5,88%). Hal tersebut dapat terjadi karena semakin bertambahnya usia pengetahuan serta keterampilan dalam pemanfaatan lembaga keuangan syariah akan mengalami penurunan. Terlebih pada usia di atas usia produktif lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan tanpa memperhatikan sumber uang yang diperoleh. Mereka belum

sepenuhnya mengetahui informasi terkait dengan lembaga keuangan syariah. Bahkan pada beberapa kasus kelompok usia tersebut apabila kekurangan uang akan meminjam pada rentenir karena lebih cepat dan tidak perlu mengurus berkas-berkas yang umumnya diajukan sebagai syarat di lembaga keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho (2017) di mana usia berpengaruh signifikan pada kepemilikan rekening dan menabung di lembaga formal atau dapat dikatakan inklusi keuangan (Nugroho, 2017).

Tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan belum tentu diikuti peningkatan inklusi keuangan syariah. Umumnya, pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan semakin luasnya wawasan lembaga keuangan syariah dan meningkatnya keterampilan dalam pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan fasilitas, manfaat, biaya, risiko, hak maupun kewajiban pada lembaga keuangan syariah juga idealnya semakin baik. Pada tingkat pendidikan SD/ sederajat dan sarjana memiliki tingkat inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks masing-masing sebesar 12,13% dan 29,41%. Sedangkan untuk kategori tingkat inklusi keuangan syariah sedang ada pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat (indeks 78,43%) dan SMA/ sederajat (indeks 76,47%). Hal tersebut dapat terjadi karena faktor lain seperti minat seseorang dalam memanfaatkan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.

Tingkat inklusi keuangan syariah untuk PNS berada pada kategori tinggi dengan indeks sebesar 100%. Hal tersebut dapat terjadi karena PNS memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi termasuk lembaga keuangan syariah terlebih pada beberapa jabatan di bidang keuangan mengharuskan penguasaan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang baik. Keuangan dikelola dapat melalui bantuan lembaga keuangan syariah sesuai dengan keperluan baik itu simpanan ataupun pinjaman. Sedangkan untuk kategori tingkat inklusi keuangan syariah

rendah ada pada responden dengan pekerjaan wirausaha (indeks 35,29%) dan ibu rumah tangga (25,88%). Wirausaha pada umumnya menggunakan jasa di luar lembaga keuangan syariah. Alasannya adalah kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh modal tambahan apalagi pada situasi yang mendesak. Sedangkan untuk ibu rumah tangga sendiri belum memiliki pengetahuan yang memadai dan pemahaman produk dan atau jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Sehingga mereka tidak terampil dalam pemanfaatan lembaga keuangan syariah.

Terakhir untuk tingkat pendapatan dan pengeluaran yang semakin besar tidak sepenuhnya diiringi dengan peningkatan inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan baik pada tingkat pendapatan <Rp 1.000.000,00 dan Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 termasuk pada kategori tingkat inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks masing-masing 25,88% dan 56,86%. Sedangkan untuk tingkat pengeluaran Rp 1.000.000,00 -Rp 3.000.000,00 masuk dalam kategori inklusi keuangan syariah rendah dengan indeks sebesar 26,74%. Pada tingkat pengeluaran Rp 3.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 masuk dalam kategori inklusi keuangan syariah tinggi dengan indeks sebesar 100%. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh faktor lain baik itu minat dalam pemanfaatan lembaga keuangan syariah ataupun keperluan individu itu sendiri.

Hasil di atas sejalan dengan responden yang menjadi nasabah dari lembaga keuangan syariah hanya sebanyak 4 orang atau sekitar 17,39% dari total responden. Alasan utama mereka menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah dikarenakan sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan untuk 19 responden atau dengan persentase 82,60% tidak membuka rekening di lembaga keuangan syariah. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi mereka yaitu :

Tabel 4.27

Latar Belakang Tidak Membuka Rekening di LKS

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
----	---------	-----------	----------------

1.	Kurang informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah	10	52,6
2.	Tidak memiliki kepentingan di Lembaga Keuangan Syariah	3	15,8
3.	Sudah memiliki rekening di Lembaga Keuangan Konvensional	6	31,6

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2022)

Alasan yang melatar belakangi sebagian besar anggota KWT yang tidak membuka rekening di lembaga keuangan syariah adalah kurangnya informasi tentang lembaga keuangan syariah dalam hal ini memiliki persentase 52,6% atau 10 orang. Selanjutnya sebanyak 6 orang atau 31,6% beralasan sudah memiliki rekening di lembaga keuangan konvensional. Adapun yang terakhir dengan persentase 15,8% atau 3 orang tidak memiliki kepentingan di lembaga keuangan syariah.

3. Kaitan Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)

Pemerintah Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga membuat suatu program desa yang diperuntukkan untuk meningkatkan pemberdayaan wanita berupa pembentukan Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri bekerja sama dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan melalui satu orang pendamping atau PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Kelompok ini terbentuk dilatarbelakangi kondisi wanita di desa tersebut di mana masih rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian. Mayoritas penduduk wanita di desa Gunungkarang adalah sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan tetap. Anggota dalam kelompok ini nantinya akan memperoleh bantuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal

tersebut dapat ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan pekarangan rumah sehingga dapat menjadi tambahan sumber pendapatan keluarga. Kelompok wanita tani ini diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan wanita di desa Gunungkarang.

Keberlangsungan program desa ditentukan oleh tercapai atau tidaknya tujuan dari program tersebut dibentuk. Pada penelitian ini, tujuan utama dari program desa yang dibentuk oleh pemerintah desa Gunungkarang bertujuan untuk membentuk KWT yang berdaya di mana kelompok tersebut mampu secara mandiri menghadapi permasalahan dalam usaha tani guna mencapai tujuan atau kesejahteraan kelompok. Tujuan pemberdayaan lebih diarahkan pada perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan pada petani itu sendiri (*better living*) (Mardikanto & Poerwoko, 2017). Salah satu indikator yang menunjukkan berdayanya suatu KWT adalah kondisi perekonomian pada kelompok tersebut, baik dalam hal peningkatan ekonomi, kemandirian dalam bentuk kepemilikan catatan laporan keuangan secara rutin, adanya kejelasan modal, maupun lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, guna melihat kondisi perekonomian baik individu maupun kelompok dapat dilihat dari tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangannya (Mukhlisin, Nurzaman, Samidi, Nasution, & Permata, 2019).

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada 23 responden dalam hal ini anggota aktif Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut disimpulkan dari nilai indeks literasi keuangan syariah sebesar 61,35%. Nilai tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan bahwa dalam Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Adapun permasalahannya yaitu keuangan dikelola oleh seseorang yang dipercaya amanah akan tetapi masih terdapat kesalahan dalam penulisan nominal di laporan keuangan dalam frekuensi yang

cukup sering. Laporan keuangan dibuat secara rutin dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan kelompok tersebut sekaligus untuk kepentingan pelaporan pada pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan pada dimensi perilaku dan sikap memiliki persentase yang lebih besar yakni masing-masing 42,1% dan 31,5%. Di mana pada dimensi perilaku salah satu indikatornya adalah melakukan manajemen keuangan atau dalam hal ini pembuatan laporan keuangan secara berkala.

Kelompok tersebut juga sudah sadar bahwa penting untuk secara konsisten membuat penganggaran atau laporan keuangan yang mana sesuai dengan salah satu indikator pada dimensi sikap. Akan tetapi, permasalahan yang timbul terkait sering terjadinya kesalahan dalam penulisan nominal pada laporan keuangan dapat dipicu oleh tingkat pengetahuan pengelola keuangan. Hal tersebut sejalan dengan persentase pada dimensi pengetahuan yang mana paling kecil dibandingkan dengan dua dimensi literasi keuangan syariah lainnya yaitu sebesar 26,4%. Ketepatan, ketelitian, serta baik benarnya penyusunan pada anggaran keuangan kelompok dan laporan keuangan menjadi indikator pada dimensi pengetahuan. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian pada saat menyusun laporan keuangan menjadi faktor utama timbulnya permasalahan pada kelompok tersebut.

Sedangkan untuk inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri masih termasuk dalam kategori rendah yang menunjukkan persentase indeks sebesar 29,9%. Nilai tersebut juga dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan bahwa dalam Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri masih kekurangan modal. Pada awalnya KWT menerima bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan sebesar lima puluh juta rupiah dan dana hibah Bupati dengan nominal sepuluh juta rupiah. Akan tetapi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan awal pembentukan kelompok seperti pembuatan demplot. Modal untuk pengelolaan hasil panen masih dirasa kurang sehingga

KWT hanya dapat menjual hasil mentah atau kebanyakan dikonsumsi dibagikan pada anggota kelompok.

Padahal, pengelolaan hasil panen dapat meningkatkan nilai jual produk. Peningkatan nilai jual produk tersebut dapat mengembangkan KWT lebih maju sekaligus meningkatkan pemberdayaan wanita dalam hal ini anggotanya. Selain itu, kelompok ini juga tidak menjadi nasabah atau mengajukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Sehingga, tidak ada pihak luar yang membantu permasalahan tersebut. Kelompok tersebut sadar akan keberadaan, fungsi dan manfaat dari produk atau jasa dari lembaga keuangan syariah yang mana merupakan indikator dari dimensi *product awareness* di mana pada penelitian menunjukkan persentase yang cukup besar yaitu 29,1%. Akan tetapi, kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa KWT tidak memanfaatkan lembaga keuangan syariah, bahkan secara personal anggota yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah hanya 4 orang dari total 23 anggota aktif KWT.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya persentase dimensi *product holding* dan *product choice* yang sebesar 16,2%. Pada dimensi *product holding* sendiri berkaitan dengan beberapa produk dan jasa keuangan yang dimiliki. Sedangkan dimensi *product choice* terkait dengan produk dan jasa keuangan yang dipilih. Padahal baik dari segi fisik maupun harga produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dapat dijangkau oleh masyarakat desa Gunungkarang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil persentase pada dimensi ketersediaan akses yaitu sebesar 38,5% atau dapat dikatakan dimensi tersebut memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan 3 dimensi lainnya pada inklusi keuangan syariah. Hanya saja memang lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank masih jarang ditemukan di sekitar wilayah Desa Gunungkarang. Adapun lembaga keuangan syariah yang banyak dijumpai dan mudah dijangkau berbentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Peran BMT yang merupakan

lembaga mikro syariah dapat turut andil mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dengan strategis dan layak dalam memfasilitasi perubahan perekonomian rumah tangga rakyat demi mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Melihat dari kondisi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri yang masih belum mampu mengatasi beberapa permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, keberlangsungan program desa terkait pemberdayaan wanita dalam bentuk KWT dapat terganggu. Secara umum, tujuan dari program desa tersebut sudah mulai tercapai tetapi belum optimal karena kelompok wanita tani tersebut belum berdaya sepenuhnya. Permasalahan yang ditimbulkan karena tingkat literasi keuangan syariah yang masih sedang di mana pengetahuan keuangan mereka masih cukup rendah sehingga laporan keuangan yang semestinya dapat disusun dengan baik untuk mengetahui kondisi keuangan kelompok tersebut seringkali terjadi kesalahan dalam penyusunan terutama pada penulisan nominalnya. Jelas, masalah tersebut cukup serius karena selisih nominal dapat mengubah kondisi keuangan yang seharusnya baik menjadi buruk begitupula sebaliknya.

Selanjutnya terkait dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang bahkan termasuk dalam kategori rendah memicu permasalahan kurangnya modal pengolahan hasil panen. Permasalahan tersebut yang apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menghambat perkembangan dari kelompok wanita tani. Umumnya, program desa dalam bentuk apapun yang terus mengalami masalah akan dihentikan baik secara permanent ataupun diubah ke dalam kebijakan yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dari 23 responden anggota aktif Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat literasi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori sedang. Adapun besarnya persentase indeks literasi keuangan syariah yaitu 61,35%. Tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan usia menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Terkait dengan pekerjaan menyesuaikan dengan pekerjaan yang digeluti dan kepentingan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikan. Terakhir untuk tingkat literasi keuangan syariah akan semakin tinggi sejalan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran yang semakin meningkat.
2. Terkait dengan inklusi keuangan syariah pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori rendah dengan nilai indeks inklusi keuangan syariah secara keseluruhan menunjukkan nilai 29,92%. Tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan usia menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran hasilnya bervariasi dipengaruhi oleh faktor lain seperti kurangnya informasi, minat, maupun kepentingan di lembaga keuangan syariah.

3. Dengan tingkat literasi keuangan syariah sedang dan inklusi keuangan syariah rendah memicu permasalahan keuangan pada KWT yang dibentuk oleh desa. Misalnya, kesalahan penulisan nominal pada laporan keuangan dalam frekuensi yang cukup sering dan kurangnya modal khususnya untuk mengolah hasil panen. Permasalahan tersebut akan mengganggu keberlangsungan program desa terkait pemberdayaan wanita dalam bentuk KWT. Secara umum dapat dikatakan bahwa, tujuan dari program desa tersebut sudah mulai tercapai tetapi belum optimal karena kelompok wanita tani tersebut belum berdaya sepenuhnya. Oleh karena itu, Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri yang merupakan bentuk dari program Desa Gunungkarang dapat terancam keberlangsungannya selagi masih tidak mampu menangani permasalahan-permasalahannya.

B. Saran

Didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yaitu :

1. Bagi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan merubah *mindset* agar menggunakan akses lembaga keuangan berbasis syariah. Karena selain meningkatkan literasi keuangan syariah pada anggotanya, kelompok tersebut juga perlu memulai kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini lembaga keuangan syariah demi kepentingan kelompok.

2. Bagi Instansi Terkait (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan)

Diharapkan untuk mengoptimalkan peran PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dalam mendampingi Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Perlunya penyuluhan, pengarahan, serta pembinaan terkait dengan

pengelolaan pertanian. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota kelompok tani lebih ditingkatkan guna mencapai tujuan kelompok dan kesejahteraan. Bukan hanya sekadar bagaimana metode menanam dan merawat tanaman akan tetapi juga diiringi dengan penyuluhan terkait pengelolaan kelompok wanita tani termasuk dari sisi keuangan.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan untuk memperluas jangkauan penelitian bukan hanya terbatas pada satu kelompok saja. Selain itu, perlu adanya penambahan indikator-indikator yang dirasa perlu atau dimensi yang menjurus pada lembaga keuangan syariah seperti simpanan dan pinjaman, asuransi, maupun investasi sehingga hasil yang diharapkan akan jauh lebih baik. Metode penelitian juga perlu ditingkatkan lagi ke model yang lebih baik yang mampu menghasilkan nilai lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B. N. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Akmal, H., & Saputra, Y. E. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 235-240.
- Ascholani, C. (2020). *Panduan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan di Desa*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga
- Camalian, M., & Setiawan, I. (2017). The Role of Women Farmer Group In Increasing Family Welfare. *Journal Mimbar*, 33(1), 348-358.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Service Review*, 7(2), 107-109.
- David, L. R. (2010). Financial Literacy Explicated : The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 279.
- Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Dermawan, R. T., Triwahyuningtyas, N., & Kusmana, A. (2020). Implementasi Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Perbankan Syariah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1391-1396.
- Desiyanti, R. (2016). Literasi dan Inklusi Keuangan serta Indeks Utilitas UMKM di Padang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 123-124.
- Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen. (2019). *Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Indonesia*. Medan: Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. (2016). *Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Fauziyanti, W., & Ernawati, F. Y. (2021). Analisa Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Kinerja Usaha UKM Petani Bunga Kopeng. *Jurnal CAPITAL*, 4(1), 193.
- Intan, N. (2020, Agustus 10). "OJK Dorong Inklusi Keuangan Lewat Pemberdayaan Perempuan". Dipetik Juni 20, 2022, dari [Republika.co.id: https://m.republika.co.id/amp/qetwgq370](https://m.republika.co.id/amp/qetwgq370)

- Laili, N., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 436.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2021). *Qur'an Kemenag in Microsoft Word versi 2.0*. Jakarta: LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat : dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marpis, A., Cholid, I., & Juwita, R. (2017). Pengaruh Usia, Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan 5 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang). *STMIK GI MDP*, 1(1), 51.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Menteri Pertanian. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Mukhlisin, M., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Nasution, A., & Permata, A. (2019). *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah.
- N.H, M. R., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Nominal : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 135-136.
- Nugroho, A. (2017). *Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Organization For Economic Co-operation and Development. (2013). *Financial Literacy And Inclusion Result Of OECD/INFE Survey Across Countries And By Gender*. Paris: OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Dipetik Agustus 26, 2021, dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Programme For International Student Assesment. (2012). *Financial Literacy Assesment Framework*. Paris: PISA.

- Putri, V. H., Isharijadi, & Yusdita, E. E. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Porang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 520.
- Saifuddin, A. (2012). *Validitas dan Reliabilitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, R. S., & Dewi, A. S. (2017). Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Kaum Muda di Indonesia (Studi Kasus Pada Komunitas Investor Saham Pemula). *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 10(3), 246-247.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen*, 9(8), 3214.
- Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenadamesia Group.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Sukarno, W., & Supriadi, D. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susilawati, E., & Puryandani, S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Struktur Modal UMKM dengan Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Pada UMKM Klaster Mebel dan Furniture Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Solusi*, 18(2), 50-51.
- Yunus, K., & Rini. (2021). Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Mashrafiyah*, 5(2), 47-51.
- Yuwono, M., Suharjo, B., Sanim, B., & Nurmawati, R. (2017). Analisis Deskriptif Atas Literasi Keuangan Pada Kelompok Tani. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 409.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI
KEUANGAN SYARIAH PADA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM DESA
(Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa
Gunungkarang, Kecamatan Bobotasari, Kabupaten Purbalingga)

Kepada Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “**Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotasari, Kabupaten Purbalingga)**” pada Program Studi Strata 1 (S-1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka saya :

Nama : Desi Latifah
NIM : 1817202010
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah

Memohon kesediaan Ibu atau Saudari untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini. Mengingat data yang dikumpulkan sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini, maka saya memohon kepada responden untuk mengisi lengkap kuesioner ini secara jujur atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas serta jawaban responden.

Atas kesediaan dan bantuan responden untuk mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Desi Latifah

Nomor :

Tanggal :

A. Profil Responden

Petunjuk pengisian : berilah tanda silang (X) ataupun *check list* (√) pada pilihan jawaban yang tersedia.

1. Nama :

2. Usia Anda saat ini (dalam tahun) :

25-35

56-65

36-45

66-75

46-55

3. Tingkat pendidikan terakhir atau sedang Anda tempuh saat ini :

Tidak tamat SD

SMA/ sederajat

SD/ sederajat

Diploma

SMP/ sederajat

Sarjana

4. Pekerjaan utama Anda :

Petani

Wirausaha

PNS

Ibu Rumah Tangga

Lainnya :

5. Tingkat pendapatan setiap bulan

Kurang dari Rp 1.000.000,00

Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.00,00

Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.00,00

Lebih dari Rp 5.000.000,00

6. Tingkat pengeluaran setiap bulan

Kurang dari Rp 1.000.000,00

Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.00,00

Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.00,00

Lebih dari Rp 5.000.000,00

B. Pertanyaan Responden

Petunjuk pengisian : berilah tanda silang (X) ataupun *check list* (√) pada pilihan jawaban yang tersedia.

1. Alasan apa yang melatar belakangi Anda tidak memiliki rekening pada lembaga keuangan syariah?

- Lembaga keuangan syariah jauh dari tempat tinggal
- Kurangnya informasi mengenai lembaga keuangan syariah
- Syarat dan ketentuan terlalu ribet
- Tidak memiliki kepentingan di lembaga keuangan syariah
- Sudah memiliki rekening di lembaga keuangan yang konvensional

2. Apa alasan utama Anda menjadi nasabah lembaga keuangan syariah?

- Memiliki kepentingan mendesak di lembaga keuangan syariah
- Sesuai dengan prinsip Islam
- Syarat dan ketentuan mudah
- Biaya yang dibebankan terjangkau
- Mengikuti saudara atau kenalan yang telah menjadi nasabah lembaga keuangan syariah

Petunjuk pengisian : pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda benar dan sesuai dengan memberikan tanda *check list* (√) pada kolom yang tersedia di bawah ini :

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Iya	Tidak
VARIABEL LITERASI KEUANGAN SYARIAH			
Dimensi Pengetahuan			
1.	Apakah Anda mengetahui cara menyusun anggaran belanja?		
2.	Apakah Anda mengetahui cara penyusunan laporan keuangan?		

3.	Apakah Anda mengetahui cara mengelola keuangan dengan baik?		
4.	Apakah Anda mengetahui cara mengelola keuangan dengan benar?		
5.	Apakah Anda mengetahui definisi lembaga keuangan syariah?		
6.	Apakah Anda mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah?		
Dimensi Perilaku			
7.	Apakah Anda secara rutin merencanakan penganggaran keuangan?		
8.	Apakah Anda rutin menyusun laporan keuangan atau anggaran belanja?		
9.	Apakah Anda menyusun keuangan dalam jangka pendek?		
10.	Apakah Anda menyusun keuangan dalam jangka panjang?		
11.	Apakah Anda memperhatikan serta mengawasi pengelolaan keuangan Anda secara berkelanjutan?		
12.	Apakah Anda melakukan pengawasan dalam penggunaan produk atau jasa lembaga keuangan?		
13.	Apakah Anda menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai ajaran Islam dalam mengelola keuangan terutama untuk pengambilan pinjaman?		
Dimensi Sikap			

14.	Menurut Anda, perlukah memahami dasar pengelolaan keuangan dengan baik?		
15.	Apakah penting untuk melakukan rencana anggaran belanja secara berkala?		
16.	Apakah Anda secara konsisten menyisihkan pendapatan Anda untuk ditabung?		
17.	Dalam pengelolaan keuangan seringkali timbul permasalahan yang harus dihadapi. Sanggupkah Anda secara mandiri menghadapi masalah tersebut?		
18.	Apakah Anda membutuhkan pihak lain khususnya lembaga keuangan syariah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan?		
VARIABEL INKLUSI KEUANGAN SYARIAH			
<i>Product Holding</i>			
19.	Apakah Anda memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan syariah?		
20.	Apakah Anda menyimpan dana melalui produk tertentu yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah?		
21.	Apakah Anda menyimpan dana melalui produk tertentu yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah?		
22.	Apakah Anda menggunakan fasilitas pembayaran yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah?		
23.	Apakah Anda pernah melakukan transaksi melalui aplikasi seperti <i>mobile banking</i> yang		

	ditawarkan lembaga keuangan syariah di <i>handphone</i> ?		
<i>Product Awareness</i>			
24.	Apakah Anda mengetahui produk dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di sekitar lingkungan Anda?		
25.	Apakah Anda memahami fungsi dari produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah?		
26.	Sudah pahamkah Anda mengenai fungsi dari produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah?		
27.	Menurut Anda, pentingkah menggunakan produk atau jasa pada lembaga keuangan syariah?		
<i>Product Choice</i>			
28.	Apakah Anda memiliki pertimbangan tertentu dalam memilih jenis lembaga keuangan syariah?		
29.	Apakah Anda sudah memilih produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah?		
30.	Apakah Anda sudah memilih produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah?		
31.	Apakah Anda menggunakan jasa lain pada lembaga keuangan syariah yang telah dipilih?		
Ketersediaan Akses			

32.	Apakah fasilitas mesin ATM mudah dijangkau oleh Anda?		
33.	Apakah lembaga keuangan syariah mudah dijangkau oleh Anda?		
34.	Apakah Anda memperoleh kemudahan dalam pembukaan rekening pada lembaga keuangan syariah?		
35.	Menurut Anda, apakah biaya pada produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang dibebankan cukup terjangkau?		



Lampiran 2 : Jawaban Responden

LITERASI KEUANGAN SYARIAH				
Responden	Dimensi Pengetahuan	Dimensi Perilaku	Dimensi Sikap	Total
1	6	6	4	16
2	6	7	4	17
3	6	7	5	18
4	1	4	3	8
5	6	6	5	17
6	2	5	4	11
7	1	3	3	7
8	5	6	5	16
9	0	3	1	4
10	0	1	1	2
11	2	5	5	12
12	0	3	1	4
13	4	7	5	16
14	3	5	5	13
15	6	7	4	17
16	3	6	5	14
17	6	6	5	17
18	1	0	0	1
19	2	6	5	13
20	2	5	5	12
21	4	6	4	14
22	0	2	1	3
23	1	1	0	2

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH					
Responden	<i>Product Holding</i>	<i>Product Awareness</i>	<i>Product Choice</i>	Ketersediaan Akses	Total
1	0	3	0	3	6
2	5	4	4	4	17
3	0	3	0	3	6
4	0	0	0	2	2
5	0	3	0	3	6
6	0	0	0	2	2
7	0	0	0	2	2
8	5	4	4	4	17
9	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1
11	0	0	0	2	2
12	0	1	0	0	1
13	0	3	0	2	5
14	0	0	0	2	2
15	4	4	4	4	16
16	0	0	0	2	2
17	5	4	4	4	17
18	0	0	1	0	1
19	0	0	0	2	2
20	0	0	0	2	2
21	0	3	0	2	5
22	0	1	0	0	1
23	0	0	1	0	1

Lampiran 3 : Output SPSS

1. Uji Validitas

Uji Validitas Literasi Keuangan Syariah										
		LK01	LK02	LK03	LK04	LK05	LK06	LK07	LK08	LK09
LK01	Pearson Correlation	1	,631**	,476*	,586**	,589**	,825**	,586**	,572**	,368
	Sig. (2-tailed)		,001	,022	,003	,003	,000	,003	,004	,084
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK02	Pearson Correlation	,631**	1	,393	,483*	,633**	,795**	,483*	,444*	,303
	Sig. (2-tailed)	,001		,064	,020	,001	,000	,020	,034	,159
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK03	Pearson Correlation	,476*	,393	1	,813**	,224	,393	,813**	,273	,511*
	Sig. (2-tailed)	,022	,064		,000	,304	,064	,000	,208	,013
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK04	Pearson Correlation	,586**	,483*	,813**	1	,397	,483*	,617**	,335	,628**
	Sig. (2-tailed)	,003	,020	,000		,061	,020	,002	,118	,001
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK05	Pearson Correlation	,589**	,633**	,224	,397	1	,633**	,397	,439*	,020
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,304	,061		,001	,061	,036	,928
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK06	Pearson Correlation	,825**	,795**	,393	,483*	,633**	1	,483*	,444*	,303
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,064	,020	,001		,020	,034	,159
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK07	Pearson Correlation	,586**	,483*	,813**	,617**	,397	,483*	1	,335	,387
	Sig. (2-tailed)	,003	,020	,000	,002	,061	,020		,118	,068
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23

LK08	Pearson Correlation	,572**	,444*	,273	,335	,439*	,444*	,335	1	,211
	Sig. (2-tailed)	,004	,034	,208	,118	,036	,034	,118		,335
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK09	Pearson Correlation	,368	,303	,511*	,628**	,020	,303	,387	,211	1
	Sig. (2-tailed)	,084	,159	,013	,001	,928	,159	,068	,335	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Uji Validitas Literasi Keuangan Syariah											
		LK10	LK11	LK12	LK13	LK14	LK15	LK16	LK17	LK18	TOTAL
LK10	Pearson Correlation	1	,617**	,530*	,387	,530*	,350	,808**	,813**	,724**	,840**
	Sig. (2-tailed)		,002	,009	,068	,009	,102	,000	,000	,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK11	Pearson Correlation	,617**	1	,530*	,387	,530*	,724**	,808**	,813**	,537**	,856**
	Sig. (2-tailed)	,002		,009	,068	,009	,000	,000	,000	,008	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK12	Pearson Correlation	,530**	,530**	1	,163	1,000**	,219	,530**	,652**	,483*	,638**
	Sig. (2-tailed)	,009	,009		,458	0,000	,316	,009	,001	,020	,001
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK13	Pearson Correlation	,387	,387	,163	1	,163	,337	,628**	,250	,337	,507*
	Sig. (2-tailed)	,068	,068	,458		,458	,116	,001	,250	,116	,013

	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK14	Pearson Correlation	,530**	,530**	1,000**	,163	1	,219	,530**	,652**	,483*	,638**
	Sig. (2-tailed)	,009	,009	0,000	,458		,316	,009	,001	,020	,001
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK15	Pearson Correlation	,350	,724**	,219	,337	,219	1	,537**	,538**	,270	,554**
	Sig. (2-tailed)	,102	,000	,316	,116	,316		,008	,008	,213	,006
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK16	Pearson Correlation	,808**	,808**	,530*	,628**	,530*	,537**	1	,813**	,724**	,920**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,009	,001	,009	,008		,000	,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK17	Pearson Correlation	,813**	,813**	,652*	,250	,652*	,538**	,813**	1	,741**	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,250	,001	,008	,000		,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
LK18	Pearson Correlation	,724**	,537**	,483*	,337	,483*	,270	,724**	,741**	1	,679**
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,020	,116	,020	,213	,000	,000		,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
TOTAL	Pearson Correlation	,840**	,856**	,638*	,507*	,638*	,554**	,920**	,874**	,679**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,013	,001	,006	,000	,000	,000	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).											

Uji Validitas Inklusi Keuangan Syariah										
		IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09
IK01	Pearson Correlation	1	1,000**	,844**	1,000**	1,000**	,572**	,572**	,572**	,694**
	Sig. (2-tailed)		0,000	,000	0,000	0,000	,004	,004	,004	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK02	Pearson Correlation	1,000**	1	,844**	1,000**	1,000**	,572**	,572**	,572**	,694**
	Sig. (2-tailed)	0,000		,000	0,000	0,000	,004	,004	,004	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK03	Pearson Correlation	,844**	,844**	1	,844**	,844**	,483*	,483*	,483*	,586**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,020	,020	,020	,003
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK04	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	,844**	1	1,000**	,572**	,572**	,572**	,694**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	,000		0,000	,004	,004	,004	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK05	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	,844**	1,000**	1	,572**	,572**	,572**	,694**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	,000	0,000		,004	,004	,004	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK06	Pearson Correlation	,572**	,572**	,483*	,572**	,572**	1	1,000**	1,000**	,244
	Sig. (2-tailed)	,004	,004	,020	,004	,004		0,000	0,000	,262
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK07	Pearson Correlation	,572**	,572**	,483*	,572**	,572**	1,000**	1	1,000**	,244
	Sig. (2-tailed)	,004	,004	,020	,004	,004	0,000		0,000	,262
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK08	Pearson Correlation	,572**	,572**	,483*	,572**	,572**	1,000**	1,000**	1	,244
	Sig. (2-tailed)	,004	,004	,020	,004	,004	0,000	0,000		,262

	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK09	Pearson Correlation	,694**	,694**	,586**	,694**	,694**	,244	,244	,244	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000	,000	,262	,262	,262	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Uji Validitas Inklusi Keuangan Syariah										
		IK10	IK11	IK12	IK13	IK14	IK15	IK16	IK17	TOTAL
IK10	Pearson Correlation	1	,694**	,694**	,694**	-,112	-,253	,468*	,384	,579**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,610	,245	,024	,071	,004
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK11	Pearson Correlation	,694**	1	1,000**	1,000**	,335	,273	,772**	,694**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,000		0,000	0,000	,118	,208	,000	,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK12	Pearson Correlation	,694**	1,000**	1	1,000**	,335	,273	,772**	,694**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,000	0,000		0,000	,118	,208	,000	,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK13	Pearson Correlation	,694**	1,000**	1,000**	1	,335	,273	,772**	,694**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,000	0,000	0,000		,118	,208	,000	,000	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK14	Pearson Correlation	-,112	,335	,335	,335	1	,813**	,018	,483*	,499*
	Sig. (2-tailed)	,610	,118	,118	,118		,000	,935	,020	,015
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK15	Pearson Correlation	-,253	,273	,273	,273	,813**	1	,353	,393	,433*
	Sig. (2-tailed)	,245	,208	,208	,208	,000		,099	,064	,039
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23

IK16	Pearson Correlation	,468*	,772**	,772**	,772**	,018	,353	1	,468*	,714**
	Sig. (2-tailed)	,024	,000	,000	,000	,935	,099		,024	,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
IK17	Pearson Correlation	,384	,694**	,694**	,694**	,483*	,393	,468*	1	,832**
	Sig. (2-tailed)	,071	,000	,000	,000	,020	,064	,024		,000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
TOTAL	Pearson Correlation	,579**	,954**	,954**	,954**	,499*	,433*	,714**	,832**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,015	,039	,000	,000	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Literasi Keuangan Syariah	
Cronbach's Alpha	N of Items
,942	18

Uji Reliabilitas Literasi Keuangan Syariah				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LK01	10,6522	29,783	,703	,938
LK02	10,7391	30,565	,591	,941
LK03	10,3043	29,494	,854	,935
LK04	10,3913	28,885	,905	,934
LK05	10,5217	31,170	,426	,944
LK06	10,7391	30,383	,628	,940
LK07	10,3913	29,704	,739	,938
LK08	10,8696	31,846	,427	,943
LK09	10,2174	31,087	,607	,940
LK10	10,3913	29,340	,812	,936

LK11	10,3913	29,249	,831	,936
LK12	10,1739	31,423	,601	,940
LK13	10,2174	31,723	,455	,943
LK14	10,1739	31,423	,601	,940
LK15	10,4348	30,893	,490	,943
LK16	10,3913	28,885	,905	,934
LK17	10,3043	29,494	,854	,935
LK18	10,4348	30,166	,629	,940

Uji Reliabilitas Inklusi Keuangan Syariah	
Cronbach's Alpha	N of Items
,958	17

Uji Reliabilitas Inklusi Keuangan Syariah				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IK01	4,9130	28,810	,947	,953
IK02	4,9130	28,810	,947	,953
IK03	4,9565	29,771	,802	,955
IK04	4,9130	28,810	,947	,953
IK05	4,9130	28,810	,947	,953
IK06	4,6957	28,676	,744	,956
IK07	4,6957	28,676	,744	,956
IK08	4,6957	28,676	,744	,956
IK09	4,7826	29,996	,521	,960
IK10	4,7826	29,996	,521	,960
IK11	4,9130	28,810	,947	,953
IK12	4,9130	28,810	,947	,953
IK13	4,9130	28,810	,947	,953
IK14	4,4348	30,348	,432	,962
IK15	4,3478	30,874	,366	,962
IK16	4,8261	29,423	,673	,957
IK17	4,7826	28,632	,804	,955

3. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Literasi Keuangan Syariah	23	1	18	254	11,04	5,819
Inklusi Keuangan Syariah	23	1	17	117	5,09	5,736
Valid N (listwise)	23					



Lampiran 4 : Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-536553; Website: febl.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 2095/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/IX/2021

Purwokerto 03 September 2021

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Desi Latifah
2. NIM : 1817202010
3. Semester : VII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Bobotsari, RT 03 / RW 10, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga
6. Judul Skripsi : Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keberlangsungan Program Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Wanita (Studi Kasus : Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri RW 04 Gunungkarang)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.

NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 2918/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Desi Latifah
NIM : 1817202010
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
Judul : Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keberlangsungan Program Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Wanita (Studi Kasus : Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri RW 04 Gumungkarang)

Pada tanggal 12/11/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 23 November 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-835624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatza.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1895/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Desi Latifah
NIM : 1817202010
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16/06/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,
dengan nilai : **86 / A**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar
ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 17 Juni 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Desi Latifah
2. NIM : 1817202010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/10 April 2000
4. Alamat Rumah : Bobotsari, RT 03 RW 10, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Achmad Sahidi
Nama Ibu : Sutimah.

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Pertiwi Bobotsari
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Bobotsari, 2012
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Bobotsari, 2015
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Bobotsari, 2018
5. S.1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018.

C. Karya Ilmiah

Peningkatan Kualitas Kader Dakwah Sebagai Upaya Mengembangkan Budaya Religius Melalui Kegiatan *Training Of Trainer*.